



# KONGRES KEBANGSAAN

— IKHTIAR MEMPERADABKAN BANGSA —



## MPR RUMAH RAKYAT

*“Bangsa Indonesia bersyukur memiliki Pancasila sebagai ideologi dan modal budaya yang berhasil menyatukan berbagai perbedaan, sehingga kemajemukan tidak menjadi sumber konflik, namun menjadi sumber kebahagiaan dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara.” (Pontjo Sutowo)*



# KONGRES KEBANGSAAN

— IKHTIAR MEMPERADABKAN BANGSA —

## MPR RUMAH RAKYAT

*“Bangsa Indonesia bersyukur memiliki Pancasila sebagai ideologi dan modal budaya yang berhasil menyatukan berbagai perbedaan, sehingga kemajemukan tidak menjadi sumber konflik, namun menjadi sumber kebahagiaan dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara.” (Pontjo Sutowo)*

---

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA  
Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

- (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

# DAFTAR ISI

## PROSIDING KONGRES KEBANGSAAN “IKHTIAR MEMPERADABKAN BANGSA”



■ KATA PENGANTAR SEKRETARIS JENDERAL MPR RI.....	5
■ KATA PENGANTAR SEKRETARIS JENDERAL ALIANSI KEBANGSAAN.....	9
■ KATA PENGANTAR KETUA FORUM REKTOR IINDONESIA.....	11
■ TERM OF REFERENCE (TOR) KONGRES KEBANGSAAN.....	13
■ SAMBUTAN KETUA STEERING COMMITTEE.....	19
■ SAMBUTAN KETUA MPR-RI.....	22
■ PIDATO KUNCI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.....	29
■ PIDATO KEBANGSAAN KETUA ALIANSI KEBANGSAAN.....	31
■ SAMBUTAN KETUA FORUM REKTOR INDONESIA.....	41
■ SAMBUTAN KETUA ASOSIASI ILMU POLITIK INDONESIA.....	45
■ SAMBUTAN WAKIL KETUA UMUM BPP HIPMI.....	48
■ TESTIMONI KEBANGSAAN TOKOH.....	51
■ EPILOG KONGRES KEBANGSAAN.....	69
■ IKRAR KEBANGKITAN KEBANGSAAN.....	73
■ HASIL RUMUSAN KONGRES KEBANGSAAN.....	74
■ PENUTUP.....	84
■ PUBLIKASI MEDIA.....	89



---

Kongres Kebangsaan ini menjadi penting dan strategis tidak saja bagi MPR sebagai lembaga demokrasi, lembaga permusyawaratan rakyat, melainkan juga untuk bangsa dan negara kita tercinta. Berbagai masukan dan aspirasi yang kami pandang fundamental dan penting ini, menjadi perlu untuk didalami dan dipahami oleh berbagai kalangan dalam kerangka upaya dan ikhtiar kita memperadabkan bangsa Indonesia.

---



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**KATA PENGANTAR  
SEKRETARIS JENDERAL MPR RI  
PADA BUKU PROSIDING KONGRES KEBANGSAAN  
“IKHTIAR MEMPERADABKAN BANGSA”**

***Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.***

Sebagai sebuah bangsa, Indonesia memiliki cita-cita dan tujuan nasional yang secara jelas termaktub dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rumusan cita dan tujuan nasional tersebut telah disadari dengan arif dan seksama oleh para pendiri bangsa bahwa Pancasila adalah dasar, fundamen, filsafat, dan landasan yang akan menjadi pijakan utama bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia masa depan.

Pancasila disamping sebagai ideologi, dasar, dan falsafah negara, juga menjadi cita-cita moral dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang memberi pandangan dan arah kepada bangsa dan negara kita sesuai dengan jati dirinya yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Seiring dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila telah menjadi sumber primer dalam memecahkan persoalan bangsa yang bersifat multidimensional. Harus diakui, Pancasila mempunyai nilai historis yang kuat yang dapat meningkatkan spirit kebangsaan, tetapi di sisi lain Pancasila mempunyai

nilai spiritual-ideologis yang dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk meneropong persoalan kekinian dan kemasadepanan.

Syukur *alhamdulillah*, MPR RI telah menyelenggarakan Kongres Kebangsaan dengan tema “Ikhtiar Memperadabkan Bangsa” sebagai kelanjutan dari rangkaian kegiatan *Focus Group Discussion* sebelumnya dengan tema besar “Mengukuhkan Kebangsaan yang Berperadaban: Menuju Cita-Cita Nasional dengan Paradigma Pancasila”.

Salah satu tujuan besar penyelenggaraan rangkaian *Focus Group Discussion* dan Kongres Kebangsaan ini adalah agar senantiasa menggugah kesadaran kolektif bangsa tentang dinamika dan tantangan kebangsaan yang sedang kita hadapi bersama. Dengan kesadaran kolektif tersebut, diharapkan dapat menciptakan ruang konsensus yang mampu menggerakkan berbagai entitas bangsa untuk senantiasa membangun peradaban Pancasila, menjaga kebhinnekaan, serta mengawal pembangunan nasional yang maju dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan acara Kongres Kebangsaan ini menjadi penting dan strategis tidak saja bagi MPR sebagai lembaga demokrasi, lembaga permusyawaratan rakyat, melainkan juga untuk bangsa dan negara kita tercinta. Berbagai masukan dan aspirasi yang kami pandang fundamental dan penting ini, menjadi perlu untuk didalami dan dipahami oleh berbagai kalangan dalam kerangka upaya dan ikhtiar kita memperadabkan bangsa Indonesia.

Mencermati dinamika kehidupan berbangsa kita hingga hari ini, patut kita hargai sebagai bagian dari proses perjalanan kebangsaan kita, saya memandang bahwa diskusi kita mengenai tantangan dan dinamika kebangsaan yang perlu dikaji, dibenahi, ataupun dikoreksi adalah tanggung jawab kita semua sebagai anak-anak bangsa guna merefleksikan pandangan terhadap perjalanan realitas kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

Melalui kesempatan ini, saya sebagai Sekretaris Jenderal MPR RI menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Aliansi Kebangsaan, Forum Rektor Indonesia (FRI), dan para mitra lembaga, di antaranya: Asosiasi

Ilmu Politik Indonesia (API), Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), serta Media KOMPAS atas jalinan kerjasama yang baik hingga acara kongres kebangsaan dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sukses.

Akhir kata, saya turut berbangga atas terbitnya buku prosiding Kongres Kebangsaan yang merangkum dedikasi, pemikiran, dan gagasan konstruktif dari para inisiator acara, para narasumber, serta para peserta kongres sekalian. Saya meyakini keberadaan buku prosiding ini akan semakin melengkapi wawasan khazanah pemikiran kita, utamanya dalam hal memahami peta jalan ikhtiar peradaban bangsa yang berdasarkan Pancasila, serta menjadi referensi atas upaya berkehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin baik ke depan.

Semoga melalui ikhtiar kita bersama dan seluruh komponen bangsa dalam menggali pemikiran, bertukar pandangan, serta merumuskan langkah-langkah yang efektif, tepat, serta konstitusional kita dapat mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin baik. *Aamiin ya rabbal alamin*, sekian dan terima kasih.

***Billahi taufiq walhidayah,***

***Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.***

Sekretaris Jenderal MPR RI,

**Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H.,M.H.**



---

Inti dari komitmen itu adalah untuk tiada henti mengucap syukur atas karunia alam dan terus dapat belajar mengambil hikmah yang ada secara berkelanjutan.

Berangkat dari pengalaman sejarah membangun peradaban kita hendaknya mampu menata kelola peradaban bangsa agar membawa hidup kita ke alam cita kebahagiaan. Secara lengkap butir-butir Ikrar Kebangkitan kebangsaan ada dalam buku ini.

---



-----

## KATA PENGANTAR

### SEKRETARIS JENDERAL ALIANSI KEBANGSAAN PADA BUKU PROSIDING KONGRES KEBANGSAAN “IKHTIAR MEMPERADABKAN BANGSA”

***Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.***

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah ke-hadirat Tuhan yang maha kuasa Allah swt. Kongres Kebangsaan telah dilaksanakan dengan sukses. Mudah-mudahan dengan kongres tersebut dapat menyegarkan kembali pemahaman tentang nilai-nilai keindonesiaan kita, nilai-nilai Pancasila. Kongres kebangsaan ini tiada lain sebagai puncak kegiatan dari rangkaian Diskusi Serial selama hampir tiga tahun, yang diselenggarakan oleh Aliansi Kebangsaan bersama mitra strategis yaitu Forum Rektor Indonesia, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dan Harian Kompas.

Kongres Kebangsaan dilaksanakan dengan mengundang kalangan cerdas pandai, kaum cendekiawan dan kalangan terdidik dari berbagai lembaga serta dari kalangan perguruan tinggi. Pelaksanaan kongres tersebut adalah hasil kerjasama Aliansi Kebangsaan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Forum Rektor Indonesia. Kongres dilaksanakan di MPR sebagai rumah seluruh rakyat Indonesia bertepatan dengan peringatan hari Sumpah Pemuda 28 Oktober sebagai tonggak penting bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

Adapun hasil kongres yang berupa rekam pandang para cendekiawan

terhimpun dalam prosiding ini. Di penghujung acara kongres dihasilkan “Ikrar Kebangkitan Kebangsaan” yang terlahir dari sebuah komitmen tulus dari lubuk hati yang dalam, atas anugrah karunia Tuhan yang selama ini terhampar di persada nusantara. Ikrar Kebangkitan Kebangsaan juga merupakan muara kearifan yang menebar dari berbagai budaya bangsa, sebagai tanda-tanda pencerahan kecerdasan dari perkembangan peradaban zaman. Inti dari komitmen itu adalah untuk tiada henti mengucap syukur atas karunia alam dan terus dapat belajar mengambil hikmah yang ada secara berkelanjutan. Berangkat dari pengalaman sejarah membangun peradaban kita hendaknya mampu menata kelola peradaban bangsa agar membawa hidup kita ke alam cita kebahagiaan. Secara lengkap butir-butir Ikrar Kebangkitan kebangsaan ada dalam buku ini.

Mudah-mudahan butir-butir isi yang terungkap dalam kongres kebangsaan yang ada dalam prosiding ini, selain sebagai ungkapan rasa syukur dapat pula menjadi momentum untuk menggugah kesadaran kebangsaan kita dalam menatap indonesia kedepan, semoga...

***Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.***

**Sekretaris Jenderal Aliansi Kebangsaan,**

**Ahmad Zacky Siradj**



## FORUM REKTOR INDONESIA

-----

### KATA PENGANTAR KETUA FORUM REKTOR INDONESIA PADA BUKU PROSIDING KONGRES KEBANGSAAN “IKHTIAR MEMPERADABKAN BANGSA”

***Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.***

Salam Sejahtera untuk kita semua

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita semua Aliansi Kebangsaan, Forum Rektor Indonesia (FRI), Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI), Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dan Media Kompas sehingga sukses menyelenggarakan Kongres Kebangsaan dengan tema “Ikhtiar Memperadabkan Bangsa” pada tanggal 28 Oktober 2021.

Kongres Kebangsaan tersebut berhasil menghadirkan banyak tokoh dari berbagai kalangan untuk menyampaikan pandangan, gagasan, dan strategi membangun peradaban bangsa berdasarkan paradigma Pancasila. FRI mendukung dan mengapresiasi penerbitan materi dari para tokoh dan seluruh hasil Kongres Kebangsaan tersebut dalam bentuk prosiding. Prosiding Kongres Kebangsaan ini akan menjadi bacaan dan rujukan yang bermanfaat bagi para pembaca dan diharapkan dapat menginspirasi masyarakat Indonesia untuk mempercepat pencapaian peradaban mulia bangsa.

FRI bersama dengan seluruh elemen bangsa lainnya siap berkolaborasi dan bersinergi melakukan orkestrasi membangun peradaban mulia yang mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sosial serta mewujudkan kemajuan bangsa dengan kemampuan unggul di bidang teknologi yang berdaya saing. Mari kita terus bergandengan tangan, bersinergi lintas bidang dan lintas generasi demi kejayaan Tanah Air, memajukan bangsa dan negara Indonesia. Semoga Tuhan yang Maha Esa meridhoi usaha kita. Aamiin

***Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh***

**Ketua Forum Rektor Indonesia**

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng.,  
D.Eng., IPU, ASEAN Eng.

*Term of Reference (TOR)*

# KONGRES KEBANGSAAN

## “Ikhtiar Memperadabkan Bangsa”

Nusantara IV, Gedung DPR/MPR-RI, Jakarta, 28 Oktober 2021

### Pendahuluan

Sebagai salah satu upaya dalam rangka membangun kembali peradaban Indonesia yang sempat mengalami apa yang disebut dengan “hegemoni peradaban kolonialisme” akibat penjajahan panjang yang dialami oleh bangsa Indonesia, Aliansi Kebangsaan bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) dan Forum Rektor Indonesia (FRI), akan menyelenggarakan “Kongres Kebangsaan” sebagai puncak rangkaian kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya oleh Aliansi Kebangsaan bekerjasama dengan berbagai mitra lembaga. Gagasan melaksanakan Kongres Kebangsaan ini mendapat dukungan luas dari kaum cendekiawan berbagai lintas profesi dan institusi, golongan pengusaha dan masyarakat politik, serta berbagai komponen bangsa lainnya yang merasa terpanggil menjadikan krisis pandemi Covid-19 yang sedang kita hadapi sebagai titik balik kebangkitan bangsa dan kebangkitan peradaban sebagaimana ditunjukkan oleh pemuda-pemudi Indonesia pada Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928 yang lalu.

Dalam rangka menggalang pemikiran dan gagasan untuk membangun kembali peradaban Indonesia, sejak 20 Maret 2019, Aliansi Kebangsaan bersama Forum Rektor Indonesia, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) serta Media Kompas telah menyelenggarakan “Diskusi Serial” selama kurang lebih tiga tahun dengan tema “**Kebangsaan yang Berperadaban: Membangun Indonesia dengan Paradigma Pancasila**”. Diskusi Serial ini dilaksanakan atas keterpanggilan dan kesadaran para cendekiawan Indonesia akan perlunya terobosan dan pendekatan baru dalam menjawab tantangan bangsa dan negara yang semakin kompleks dalam melaksanakan pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-

cita “Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Melalui pertukaran pikiran dan gagasan yang panjang selama pelaksanaan Diskusi Serial tersebut, telah dikembangkan suatu pendekatan “budaya/peradaban” berdasarkan paradigma Pancasila, sebagai kerangka operasional pembangunan nasional dalam tiga ranah kehidupan bangsa, yaitu: ranah mental-kultural (tata nilai), ranah institusional-politikal (tata kelola), dan ranah material-teknologikal (tata sejahtera). Pendekatan “Tiga Ranah Peradaban” dengan paradigma Pancasila ini diyakini dapat digunakan sebagai tolok ukur paradigmatis dalam menguji dan mengembangkan sistem ketahanan dan pembangunan nasional kita. Tentu dalam mengembangkan pendekatan/paradigma baru ini diperkuat oleh berbagai rujukan teori dengan tetap mengakar pada nilai-nilai ke-Indonesiaan kita.

Penjelasan tentang ranah mental-kultural bisa meminjam argumentasi dari Arnold Toynbee (1947) dan Oswald Spengler (1991). Dalam bukunya, *A Study of History*, Toynbee melakukan pelacakan terhadap faktor kebangkitan dan kejatuhan sekitar dua- puluhan peradaban, dengan kesimpulan yang mengaitkan disintegrasi peradaban dengan proses melemahnya visi spiritual peradaban tersebut. Hal senada dikemukakan oleh Spengler, dalam bukunya *The Decline of the West*. Ia menengarai kemunduran peradaban Barat disebabkan oleh pudarnya “jiwa” budaya atau kultural (spirit, etos, etika, *mindset*) yang menjadi “*elan vital*” (semangat perjuangan) sebuah peradaban.

Sementara itu, berkaitan dengan ranah institusional-politikal atau tata kelola kelembagaan politik, antara lain telah dikemukakan oleh Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam buku bersamanya “*Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty* (2012)”. Keduanya menengarai bahwa sebab pokok kegagalan suatu negara- bangsa (*nation-state*) bukan karena kurang adidaya atau sumberdaya, melainkan karena salah urus, alias salah desain kelembagaan dan tata-kelola pemerintahannya.

Terakhir, penjelasan tentang ranah material-teknologikal diajukan oleh banyak pemikir. Bahwa ide dan peradaban dari suatu kelompok yang dominan dalam penguasaan (sumberdaya) material dan teknologi akan kuat mempengaruhi ide dan peradaban kelompok lain. Menurut Toynbee, semakin

tinggi teknologi sebuah peradaban, semakin mudah meradiasi lapisan-lapisan budaya pada peradaban lain. Lebih dari itu, para pemikir lintas zaman dan lintas mazhab, meski dengan perspektif yang berbeda-beda, menunjukkan kesamaan kepedulian terhadap pentingnya memperhatikan keadilan kesejahteraan umum. Para pemikir utilitarian seperti Jeremy Bentham menekankan pentingnya kesejahteraan umum sebagai basis ketahanan dan kebajikan sosial.<sup>1</sup>

Ketiga ranah tersebut saling terkait dan berinter-relasi satu sama lain. Apabila diibaratkan sebagai pohon, maka ranah tata nilai adalah akarnya, yang menjadi fondasi dan memberi energi ke ranah lainnya. Tata kelola ibarat batang yang menjadi inti dari sebuah pohon, dan ranah tata sejahtera ibarat bunga dan buah pohon tersebut yang memberikan manfaat bagi kehidupan.

Membangun peradaban bangsa dengan paradigma Pancasila melalui pendekatan tiga ranah peradaban mengandung beberapa pokok pikiran penting. *Pertama*, bahwa membangun peradaban adalah sebagai upaya pembangunan berkelanjutan dalam satu tarikan nafas yang padu antara kebutuhan akan menguatnya kebangsaan (*nation*) melalui “*nation building*”, dan kebutuhan akan hadirnya negara (*state*) melalui “*state building*”; *Kedua*, membangun peradaban dengan paradigma Pancasila merupakan upaya membangun peradaban yang bersifat inklusif sehingga mencerminkan adanya partisipasi seluruh rakyat, dan dengan terus memperkokoh demokrasi pernyusyawaratan; *Ketiga*, membangun peradaban dengan paradigma Pancasila melalui tiga ranah peradaban adalah dengan menjabarkannya secara kontinyu, konvergen, dan konsentris ke dalam tiga dimensi ideologis, yaitu: keyakinan, pengetahuan, dan tindakan. Hal ini penting untuk menjembatani antara nilai-nilai dan realitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai pengejawantahan nilai-nilai Pancasila dalam tataran praksis; *Keempat*, membangun peradaban dengan paradigma Pancasila harus ditopang dengan penjabaran Pancasila ke dalam suatu panduan ideologis dan strategik teknokratis sebagai pedoman dalam bentuk Pokok-Pokok Haluan Negara yang memberikan arah dan tujuan

pembangunan nasional baik dalam jangka panjang, menengah maupun dalam jangka pendek; *Kelima*, bahwa membangun peradaban dengan paradigma Pancasila harus didukung oleh kemampuan dan kapasitas para pemimpinnya untuk mempersatukan bangsa yang majemuk sesuai dengan



semboyan negara “Bhinneka Tunggal Ika” serta kemampuan visioner dalam mendesain masa depan bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila.

Upaya pengembangan paradigma yang dibangun dari berbagai argumentasi dan pemikiran selama pelaksanaan Diskusi Serial tersebut telah dirangkum ke dalam draft buku dengan judul “**Memperadabkan Bangsa: Paradigma Pancasila untuk Membangun Indonesia.**” Draft buku ini sudah melewati beberapa tahap revisi dengan berbagai kritik dan masukan dari para ahli, baik dalam forum diskusi internal maupun diskusi publik.

Sebagai muara dari proses pembentukan gagasan dan pemikiran, “paradigma tiga ranah pembangunan berdasarkan Pancasila” tersebut akan disampaikan dalam kegiatan Kongres Kebangsaan untuk dapat dikembangkan, diperkaya, dan disebarluaskan agar bermanfaat bagi pembangunan peradaban bangsa. Kegiatan Kongres Kebangsaan yang rencananya akan dilaksanakan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2021 ini mengusung tema “**Kongres Kebangsaan: Ikhtiar Memperadabkan Bangsa.**”

Pelaksanaan kongres kebangsaan sengaja dilaksanakan bertepatan dengan peringatan “Sumpah Pemuda 1928” yang merupakan tonggak sejarah penting dalam proses tumbuhnya kebangsaan Indonesia. Kesadaran dan pengakuan para pemuda waktu itu atas berbagai perbedaan yang ada kemudian berkehendak untuk melebur dalam satu bangunan ke-Indonesiaan menandai adanya semangat dan janji kebangsaan serta loncatan peradaban yang luar biasa, sebuah transformasi kultural dari nasionalisme etnis menjadi nasionalisme madani. Ikrar yang dinyatakan pada saat Sumpah Pemuda 1928 merupakan perwujudan kehendak para pemuda untuk hidup bersama sebagai satu bangsa, dengan menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan dalam satu kesatuan tanah tumpah darah, tanah air Indonesia.

Semangat dan janji kebangsaan tersebut tentu harus terus dipelihara, dipupuk, bahkan kita kuatkan kembali atau revitalisasi manakala bangsa

Indonesia mengalami cobaan berat seperti krisis akibat pandemi Covid-19 yang kita alami saat ini. Untuk itu, kiranya tepat, peringatan hari bersejarah Sumpah Pemuda ini kita jadikan momentum penguatan kebangsaan kita melalui penyelenggaraan Kongres Kebangsaan sebagai ikhtiar memperadabkan bangsa,

menjadikan krisis pandemi Covid-19 sebagai titik balik kebangkitan bangsa, dan kebangkitan peradaban Indonesia.

Kongres Kebangsaan rencananya akan dihadiri dan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia. Dalam Kongres Kebangsaan ini akan disampaikan juga pidato kebangsaan oleh Ketua MPR-RI, Ketua Aliansi Kebangsaan, Ketua Forum Rektor Indonesia, sambutan dari beberapa mitra lembaga penyelenggara, serta pesan-pesan kebangsaan dari beberapa pejabat Negara, tokoh nasional, pemuka bangsa, dan komponen bangsa lainnya.

## **Tujuan**

Kongres Kebangsaan ini bertujuan untuk:

1. Secara substansi acara ini ditujukan untuk menggugah kesadaran kolektif tentang persoalan-persoalan mendasar dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, serta mengggalang tanggung jawab intelektual para cendekiawan untuk turut berperan dan memberikan kontribusi pemikiran dalam ikhtiar memperadabkan bangsa dengan paradigma Pancasila.
2. Menawarkan kerangka berpikir dengan paradigma “Tiga Ranah Peradaban” berdasarkan Pancasila sebagai masukan dalam menyusun peta jalan pembangunan (rekomendasi kebijakan) dalam meraih cita-cita nasional yang selanjutnya dapat digunakan sebagai pijakan (*platform*) dalam penyusunan sistem perencanaan pembangunan nasional.
3. Menjadi ruang konsensus bersama berbagai entitas sesuai kodrat bangsa Indonesia yang bhinneka, dalam upaya membangun peradaban Pancasila.

## **Penyelenggara Lembaga Utama:**

1. Aliansi Kebangsaan
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat – Republik Indonesia (MPR-RI)
3. Forum Rektor Indonesia

**Mitra Lembaga:**

1. Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB)
2. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)
3. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)
4. Media Kompas

**Waktu Penyelenggaraan**

Acara akan diselenggarakan secara *hybrid*, dimana 200 orang akan hadir fisik dengan ketentuan protokol kesehatan yang berlaku dan 300 orang atau lebih melalui zoom *meeting*. Adapun untuk pelaksanaan di tempat sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Oktober 2021

Pukul : 10.00 – 12.00 WIB

Tempat : Gedung Nusantara IV, MPR RI & Zoom Meeting

## Sambutan Ketua Steering Committee Mayjen TNI (Purn) I Dewa Putu Rai



***Assalamualaikum warrahmatullahi  
wabarakatuh.***

Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua, *shalom om swastyastu*, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo yang nanti akan hadir melalui video, Ketua MPR RI Bapak Bambang

Soesatyo, Ketua Aliansi Kebangsaan Bapak Pontjo Sutowo, Ketua Forum Rektor Indonesia Bapak Panut Mulyono, dan segenap peserta Kongres Kebangsaan yang saya muliakan baik yang hadir di ruangan ini atau yang hadir di media Zoom.

Izinkan saya selaku ketua *steering committee* menyampaikan laporan sebagai pengantar pelaksanaan Kongres Kebangsaan pada hari ini, yang digagas bersama oleh Aliansi Kebangsaan, MPR RI, Forum Rektor Indonesia dan berbagai mitra pendukung lainnya. Kongres Kebangsaan ini sengaja dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda yang merupakan tonggak sejarah penting dalam proses tumbuhnya kebangsaan Indonesia. Walaupun bangsa Indonesia sebagai kesatuan identitas baru lahir pada momen bersejarah Sumpah Pemuda ini, namun peradaban Indonesia sesungguhnya sudah berakar di elemen-elemen sosial budaya yang telah puluhan ribu tahun lamanya hadir di bumi Nusantara. Oleh karena itu, Clifford Geertz dalam bukunya *Old Societies and New States*, mengilustrasikan Indonesia sebagai anggur tua dalam botol baru, '*old wine in a new bottle*' atau gugusan masyarakat lama

dalam negara baru. Bahkan di masa lalu, bangsa ini diakui pernah memiliki peradaban tinggi dengan penguasaan teknologi yang tinggi pula pada zamannya. Tanpa penguasaan teknologi tinggi, rasanya mustahil anak-anak bangsa pada zaman kerajaan Syailendra mampu membangun Candi Borobudur yang memiliki 2.672 panel relief dan 504 arca buddha. Namun harus diakui, bahwa peradaban bangsa Indonesia pernah juga mengalami keterpurukan akibat penjajahan ratusan tahun lebih sehingga mengalami apa yang disebut hegemoni peradaban kolonialisme. Dalam rangka menggalang pemikiran dan gagasan untuk membangun kembali peradaban Indonesia, maka sejak Maret 2019, Aliansi Kebangsaan, bersama Forum Rektor, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Yayasan Suluh Nuswantara Bhakti, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, serta Media Kompas telah menyelenggarakan diskusi serial selama kurang lebih 3 tahun dengan tema “Kebangsaan yang Berperadaban, Membangun Indonesia dengan Paradigma Pancasila.”

Diskusi serial ini dilaksanakan atas keterpanggilan dan kesadaran para cendekiawan Indonesia akan perlunya terobosan dan pendekatan baru dalam menjawab tantangan pembangunan bangsa (*nation building*) dan pembangunan negara (*state building*) untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur. Hari ini hadir di ruangan ini, terdapat 165 orang dan melalui Zoom, terakhir saya lihat 405 orang. *Alhamdulillah*. Melalui pertukaran pikiran dan gagasan selama pelaksanaan diskusi serial tersebut telah dikembangkan suatu pendekatan budaya/ peradaban berdasarkan paradigma Pancasila sebagai kerangka operasional dalam tiga ranah kehidupan bangsa: **mental kultural (tata nilai), ranah institusional politikal (tata kelola), dan ranah material teknologikal (tata sejahtera)**. Pendekatan tiga ranah peradaban dengan paradigma Pancasila ini diyakini dapat digunakan sebagai tolok ukur paradigmatis dalam menguji dan mengembangkan sistem ketahanan nasional dan pembangunan nasional kita. Berbagai argumentasi serta pemikiran selama pelaksanaan diskusi serial tersebut telah dirangkum dalam sebuah buku yang saat ini masih dalam proses pencetakan. Upaya mensosialisasikan dan memperkaya berbagai pemikiran dalam pendekatan paradigma tersebut terus dilaksanakan, puncaknya diharapkan melalui kegiatan Kongres Kebangsaan hari ini.

Gagasan pelaksanaan Kongres Kebangsaan ini mendapat dukungan cukup luas dari kaum cendekiawan, berbagai lintas profesi dan institusi, golongan pengusaha dan masyarakat politik, serta berbagai komponen bangsa lainnya yang merasa terpanggil menjadikan krisis pandemi Covid-19 yang sedang kita hadapi menjadi titik balik kebangkitan bangsa sebagaimana komitmen dan janji kebangsaan yang diikrarkan oleh pemuda-pemudi Indonesia pada Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928 yang lalu. Komitmen dan janji kebangsaan yang menyatukan semua perbedaan dalam satu identitas bangsa, tanah air dan bahasa Indonesia tersebut tentu merupakan modal sosial yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia yang harus dirawat dan dikuatkan kembali untuk kemajuan bangsa dan negara ke depan.

Saat ini kita sedang menghadapi ujian berat pandemi Covid-19 dengan dampaknya yang begitu luas. Untuk itu, kiranya Kongres Kebangsaan ini dapat dijadikan ruang dan momentum penguatan komitmen kebangsaan kita dalam ikhtiar memperadabkan bangsa sebagaimana tema Kongres Kebangsaan ini. Akhirnya, atas nama penyelenggara, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas dukungan dan kehadiran Bapak Presiden nanti melalui video, serta semua pihak dalam Kongres Kebangsaan ini. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat bagi bangsa dan negara tercinta untuk terus maju Sekian dan terima kasih ke depan.

***Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.***

Om shanti shanti shanti om.

# Sambutan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

H. Bambang Soesatyo, SE, MBA



***Assalamualaikum warrahmatullahi  
wabarakatuh.***

Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua, *shalom om swastyastu*, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang akan menyampaikan sambutan pembuka kunci dalam acara Kongres Kebangsaan pada acara pagi hari ini, Yang saya hormati dan banggakan para pimpinan MPR, DPR, DPD Republik Indonesia, Pak Syarif Hasan, dan kawan-kawan yang lain, Pimpinan Fraksi MPR, Yang kita banggakan semua ketua Aliansi Kebangsaan Bapak Pontjo Sutowo, Ketua *steering committee* yang tadi menyampaikan laporan, Mayjen I Gede Putu Rai, Ketua Forum Rektor Indonesia, Prof. Ir. Panut Mulyono dan para rektor yang hadir, ada rektor dari Universitas Hasanuddin, rektor Universitas Terbuka, rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Saya lihat juga ada senior kita semua, Pak Abdul Latif dan lain-lain, segenap pimpinan mitra lembaga dari Yayasan Suluh Nuswantara Bhakti, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Pimpinan Kompas, Pimpinan FKPP, para tokoh bangsa yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu,

sekalian yang saya banggakan, Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Allah SWT, bahwa pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan tanpa kurang suatu apapun dan hadir dalam acara Kongres Kebangsaan yang sangat penting dengan tema, 'Ikhtiar Memperadabkan Bangsa.' Ini merupakan kelanjutan dari rangkaian kegiatan FGD beberapa waktu lalu dengan tema besar,

'Mengukuhkan Kebangsaan yang Berperadaban Menuju Cita-cita Nasional dengan Paradigma Pancasila.' Jadi, kurang lebih peradaban kita masih kita pertanyakan bersama.

Kongres Kebangsaan yang kita selenggarakan pada hari ini juga bertepatan dengan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah ikrar kebangsaan yang mendobrak sekat-sekat primordialisme dan menuntut kesadaran kolektif kita bahwa ditengah kemajemukan kita sebagai sebuah bangsa, satu satunya cara untuk dapat bertahan dari pusaran peradaban dan dinamika zaman adalah dengan mentransformasikan setiap diri kita dari sebagai bagian satu Keindonesiaan. Sebagaimana pandangan Bung Karno, bahwa frase dari Sabang sampai Merauke, bukanlah rangkaian kata-kata sekedar rangkaian kata-kata yang merepresentasikan entitas geografis melainkan satu entitas kebangsaan, kenegaraan, satu kesatuan tekad, satu kesatuan ideologi dan cita-cita sosial yang hidup dalam gelora semangat kebangsaan dalam membangun peradaban. Sejarah juga membuktikan, bahwa mustahil kita dapat membangun peradaban tanpa ada semangat kebangsaan. Semangat inilah yang menjiwai dan menjadi sumber menginspirasi bagi penyelenggaraan Kongres Kebangsaan pada hari ini.

Sungguh saya menyambut baik dan gembira atas penyelenggaraan Kongres Kebangsaan ini. Mengingat penyelenggaraan dilakukan oleh Aliansi Kebangsaan bersama MPR, Forum Rektor Indonesia dan para mitra lembaga di antaranya Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Yayasan Suluh Nuswantara Bhakti, Himpunan Pemuda Indonesia, Media Kompas dan para elit media-media yang lain. Kegembiraan saya semakin lengkap karena secara substansi tujuan kongres ini adalah untuk menggugah kesadaran kolektif kita tentang persoalan-persoalan mendasar dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, serta menggalang tanggung jawab intelektual untuk turut memberikan kontribusi pemikiran dalam usaha transformasi sosial. Melalui Kongres Kebangsaan ini, akan menawarkan peta jalan pembangunan sebagai masukan rekomendasi kebijakan bagi penyusunan sistem perencanaan pembangunan nasional serta menjadi ruang konsensus bersama berbagai entitas dalam pergumulan Indonesia yang *bhineka* dalam upaya membangun peradaban Pancasila. Saya sependapat dengan pernyataan bahwa 'Pancasila adalah soal perjuangan,' Pancasila tidak kita warisi dari nenek moyang kita menurut hukum mendel. Pancasila adalah soal keyakinan dan pendirian azasi. Pancasila tidak akan bisa tertanam dalam jiwa kita jika kita sendiri masing-masing



tidak berjuang baik untuk masyarakat, bangsa dan negara maupun untuk setiap individu. Usaha penanaman Pancasila harus berjalan terus menerus tanpa ada henti. Tak seorangpun akan menjadi Pancasila-lais, kau dan aku Pancasila-lais, tapi bisa juga tidak Pancasila-lais kalau tidak seperti yang apa saya sampaikan tadi. Tak seorangpun akan menjadi Pancasila-lais kalau dia tidak membuat dirinya Pancasila-lais. Negara kita tidak akan menjadi negara Pancasila jika kita tidak memperjuangkannya dalam setiap lini masa periodisasi zaman. Dalam perspektif Pancasila, peradaban Indonesia sebagai puncak perkembangan kebudayaan nasional merupakan kerangka operasional dalam pembangunan tiga ranah kehidupan bangsa sekaligus, yaitu:

1. Ranah mental spiritual (tata nilai) yang menegaskan pentingnya penguatan visi spiritual peradaban dan menjaga terpeliharanya etos, etik dan mindset sebagai jiwa budaya peradaban.
2. Ranah *institutional political* (tata kelola) yang mengamanatkan pentingnya pengelolaan manajerial pemerintahan dan ketepatan desain kelembagaan institusi negara agar tidak terjadi salah urus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Ranah material teknologikal (tata sejahtera) yang menempatkan keadilan material dan kesejahteraan umum sebagai landasan fundamental dalam membangun ketahanan dan kebajikan sosial.

Penting bagi kita sadari bahwa membangun peradaban harus dilandasi oleh kesadaran, bahwa tidak ada satupun peradaban di dunia ini sekuat dan sehebat apapun kelihatannya akan kebal dalam potensi kerentanan yang dipicu oleh beragam faktor, antara lain:

1. Ketidaksetaraan dan oligarki politik yang melemahkan kohesi sosial dan mendorong terjadinya disintegrasi bangsa.
2. Degradasi ekologi dimana kemampuan sumber daya lingkungan semakin rapuh dalam menopang kebutuhan masyarakat yang tumbuh dalam lompatan deret ukur.
3. Kompleksitas tantangan dan persoalan dalam kehidupan kebangsaan.

4. Faktor eksternal yang tidak terprediksi seperti perang, wabah, bencana alam dan lain-lain.

Dalam pandangan global, hingga abad ke-20, banyak pakar sejarah terkemuka diantaranya Johann Gustav Droysen, Georg Friedrich Hegel, Karl Marx dan Oswald Spengler yang meyakini bahwa sejarah adalah proses linear menuju kemajuan. Namun, jika kita cermati lebih dalam, rujukan fakta sejarah justru mengindikasikan bahwa sejarah peradaban bersifat dinamis. Pasca Perang Dunia II, Uni Soviet adalah representasi negara dengan peradaban terkuat di dunia namun akhirnya runtuh juga pada periode tahun 80an hingga 90an. Inggris yang sempat berjaya memimpin peradaban barat tergeser oleh Amerika Serikat yang menguasai hegemoni global dalam waktu yang relatif lama. Namun, kita pun terhenyak ketika mendengar bahwa Amerika Serikat memiliki tanggungan hutang sebesar 400 ribu triliun yang mengancam terhentinya roda pemerintahan atau *government shutdown*, potensi gagal bayar *default* hingga krisis finansial. Sebagai catatan, Amerika pernah mengalami penutupan pemerintahan sebanyak 20 kali sejak tahun 1976. Sejarah juga membuktikan bahwa jatuh bangun dinamika peradaban adalah suatu keniscayaan dan selalu menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh setiap negara.

Dinamika peradaban global juga mengajarkan bahwa konstruksi peradaban tidak dapat hanya ditopang oleh pembangunan infrastruktur yang berupa mengubah perilaku keberadaban kita menyesuaikan standar modernitas zaman. Kita dapat melihat puncak-puncak peradaban hancur karena hanya mengandalkan aspek finansial belaka. Kemampuan untuk mempertahankan dan membangun peradaban akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan setiap negara untuk belajar dari masa lalu dan melakukan adaptasi serta inovasi untuk masa depan. Namun menurut saya, yang jauh lebih penting adalah kemauan untuk membangun jati diri dan karakter kebangsaan sebagai landasan fundamental agar tidak mudah limbung oleh turbulensi peradaban.

Di sinilah letak dasar fundamental dari urgensi membangun peradaban dalam paradigma Pancasila. Ketika para pendiri negara Indonesia menyiapkan berdirinya Negara Indonesia Merdeka, mereka sadar untuk menjawab suatu pertanyaan fundamental. Di atas dasar, 'apakah negara Indonesia merdeka didirikan?' dengan

jawaban yang mengandung hidup bagi bangsa Indonesia sendiri, yang merupakan perwujudan dan pengejawantahan nilai-nilai yang dimiliki dan dihayati kebenarannya oleh masyarakat sepanjang mata dalam sejarah perkembangan dan penguatan bangsa. Nilai-nilai itu merupakan buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik. 'Atas dasar apakah Negara Indonesia Merdeka didirikan?' Mereka pendiri bangsa menciptakan tata nilai yang mendukung tata kehidupan sosial dan tata kerohanian bangsa yang memberi corak, watak, dan ciri masyarakat dan bangsa Indonesia yang membedakan dengan masyarakat atau bangsa lain. Kenyataan yang demikian merupakan suatu kenyataan objektif yang merupakan jati diri bangsa Indonesia. Dalam konteks inilah, harusnya kita semua penyelenggara negara menangkap esensi kebudayaan yang sejati sehingga kita dapat tegas menyatakan bahwa kebudayaan sebagai peta jalan pembangunan bangsa yang dapat mencegah terjadinya proses reduksi budaya, karena reduksi budaya dalam pembangunan nasional akan menghancurkan tatanan kehidupan bangsa kita.

Berangkat dari kenyataan demikian, perlu ada pemikiran dan kekuatan alternatif untuk mengingatkan dan menunjukkan peta jalan pembangunan yang dapat diandalkan, jalan pembangunan yang lebih menjamin ketahanan nasional dengan kesanggupan untuk merealisasikan visi dan misi negara yang berdasarkan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Visi negara sebagaimana tertuang pada Alinea Kedua dalam Pembukaan UUD 1945 adalah 'Terwujudnya perikehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.' Adapun misi negara sebagaimana tertuang dalam Alinea Keempat adalah, 'Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.' Kalimat-kalimat itu merupakan tantangan yang harus kita wujudkan untuk menuju kesejahteraan rakyat kita.

Cita-cita mewujudkan visi dan misi negara yang bersifat prinsipil tersebut, tentunya harus diterjemahkan dalam rujukan **Haluan Negara**. Jangan biarkan bangsa ini berjalan tanpa haluan yang idealnya menjadi wewenang seluruh rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara dan direpresentasikan melalui lembaga perwakilan sebagaimana sila ke-empat. Dalam konsepsi ini, MPR adalah lembaga perwakilan yang dianggap terlengkap, yang mewakili representasi rakyat (DPR)

dan representasi teritorial (DPD). Walaupun masih ada kurang satu yaitu utusan golongan yang mewakili kelompok-kelompok minoritas, termarginalkan sebagaimana pendiri bangsa ini memikirkannya ketika mendirikan negara Republik Indonesia. Inilah yang melatarbelakangi MPR Periode 2009-2014 dan MPR Periode 2014-2019 merekomendasikan perlunya bentuk pokok-pokok Haluan Negara.

Perlu saya tegaskan bahwa pembahasan pokok-pokok Haluan Negara (PPHN), kiranya kurang bijaksana jika hanya mendasarkan sikap politik setuju atau tidak setuju yang kemudian dicari berbagai alasan afirmatif untuk mendukung sikap tersebut. Kiranya layak diperhatikan juga, bahwa negara Indonesia dalam mencapai tujuan berbangsa dan negara bukan hanya fragmentaris melainkan secara terencana dengan matang dan terintegrasi dengan wilayah-wilayah lain di berbagai wilayah di Indonesia. Otonomi Daerah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap daerah untuk memajukan dan meningkatkan potensi daerah dalam mewujudkan kesejahteraan warganya, namun dalam perspektif nasional, negara berkewajiban untuk mensejahterakan seluruh warga di seluruh daerah di Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik tanpa perencanaan yang matang dan berkesinambungan, dengan strategi kebijakan serta arah yang koheren dengan kaidah pokok negara yang fundamental atau *staats fundamental norm*. PPHN dalam konteks saat ini tidak hanya penting namun mendesak dan harus dilakukan untuk mewujudkan pembangunan nasional yang selaras dan konsisten dengan paradigma Pancasila, serta berkesinambungan dan berkelanjutan secara lintas periode pemerintahan. PPHN mengarahkan pengelolaan pembangunan nasional, mewujudkan cita-cita nasional yaitu membangun negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Saya tidak bisa membayangkan jika setiap pergantian pemimpin nasional, kita juga berganti haluan. Saya jamin kita tidak akan maju jika setiap ada pergantian pimpinan nasional maupun daerah selalu ada perubahan haluan.

Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya mengingatkan bahwa proses perumusan Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia merupakan traktat kebudayaan yang memandu kita menghampiri peradaban masa depan. Untuk itu saya sependapat dengan Yudi Latif, bahwa Pancasila harus dijadikan tolok ukur paradigma untuk mengembangkan dan menguji sistem pembangunan dan ketahanan nasional Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila sebagai gatra ideologi

tidak ditempatkan sejajar dengan gatra politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan hankam melainkan berdiri diatas atau mengatasi gatra-gatra lainnya. Taraf pembangunan dan ketahanan nasional di berbagai gatra tersebut bisa diukur berdasarkan imperatif Pancasila dalam ranah mental karakter, institusional politikal serta material teknologikal. Dengan demikian, Pancasila menjadi landasan ideologi kerja yang dapat memberikan *framework* atau panduan dan haluan yang memudahkan perumusan pembangunan, penancangan program serta pilihan kebijakan dalam rangka memperkuat ketahanan nasional dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Untuk itu saya mengajak semua elemen masyarakat, negara dan bangsa, untuk melakukan konsolidasi sebagai kerja baik yang tidak boleh ditunda. Pada setiap kerja baik, setidaknya mengamalkan dua prinsip:

1. Niat atau itikad baik, sebagaimana diamanatkan dalam sebuah hadist Rasullullah, yang diriwayatkan oleh Umar bahwa semua perbuatan tergantung niatannya, (*‘innamal a’malu binniyat’*). Sementara kita memahami bahwa niat merefleksikan pada perencanaan dan rencana membuahkan perbuatan yang merupakan amal. Sehingga, iman, niat, perencanaan dan amat atau hasil perbuatan adalah suatu rangkaian yang berkesinambungan.
2. Komitmen kuat dan tekad yang bulat, serta tidak boleh ada kata menyerah sebelum tercapainya tujuan. Maju terus pantang mundur. Bagaimana firman Allah SWT Al Quran surat Ad-dhuha ayat 4, ‘Dan sungguh kemudian yang lebih baik bagimu dari yang permulaan.’ *‘Walal akhirotu khoirul laka minal ula’* Kita mengetahui bahwa yang akhir itu adalah terwujudnya tujuan.

Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan, semoga Kongres Kebangsaan ‘Ikhtiar Memperadabkan Bangsa’ ini dapat menjadi forum konsolidasi sebagai kerja baik yang tidak boleh ditunda serta memberikan manfaat masyarakat bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai ini. Demikian, saya sampaikan lebih kurangnya mohon maaf, semoga Tuhan YME senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita.

***Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.***

# Pidato Kunci

## Presiden Republik Indonesia

### Ir. H. Joko Widodo



***Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,***

Salam sejahtera bagi kita semuanya, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang saya hormati Ketua MPR RI, Para Wakil Ketua MPR RI, Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Hadirin dan undangan yang berbahagia. Peringatan Sumpah Pemuda ini mengingatkan kita betapa

pentingnya kata 'satu' satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, satu bahasa persatuan Bahasa Indonesia. Satu dan persatuan itu merupakan kata kunci dalam berbangsa dan bernegara, walaupun ada lebih dari 270 juta penduduk, semua penduduk tetap satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa persatuan. Ada individu dengan segala kebebasannya tetapi ada kepentingan bersama dengan segala konsensus dan konsekuensinya. Komitmen terhadap kebebasan individu dijamin oleh konstitusi, tetapi menjadi Indonesia Incorporated, bangsa yang bersatu kekuatannya merupakan syarat utama untuk memenangkan persaingan global.

*Landscape* ideologi politik dan ekonomi global saat ini penuh dengan disrupsi dan penuh dengan kompetisi. Setelah Revolusi Industri 4.0, dalam dua tahun ini disrupsi dipertegas oleh pandemi Covid-19. Pandemi Covid mengajarkan kepada kita tentang posisi sentral kita sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa selamat sendirian, makhluk yang hanya bisa selamat kalau semua diselamatkan. Pandemi mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada yang bebas dari resiko Covid sampai semua terbebas dari Covid. Solusi pandemi bukanlah

solusi individual, melainkan solusi bersama. Pandemi Covid-19 mengajarkan kepada kita tentang pentingnya saling mengingatkan, saling membantu dan saling mendisiplinkan. Kita harus menggunakan masker setiap saat, ketika sakit harus mengisolasi diri sendiri - hal ini bukan hanya agar kita tidak terkena Covid-19 dan bisa segera sembuh, tetapi itu harus kita lakukan agar kita tidak menularkan kepada orang lain. Tidak ada yang aman dari Covid-19 sampai semua orang aman. Artinya, pandemi juga mengajarkan moralitas dan etika, tentang keseimbangan antara kebebasan individu dengan stabilitas sosial dan kepentingan bersama. Tetapi, tentang keseimbangan antara demokrasi dengan pemerintahan dan pelayanan efektif, tentang keseimbangan antara pengawasan dan audit dengan fleksibilitas dan kecepatan. Pandemi juga mengajarkan kepada kita untuk selalu merujuk terhadap kaidah ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi terbaru. Kecepatan untuk menyediakan vaksin dan obat-obatan menunjukkan betapa pentingnya pengetahuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemandirian ekonomi dan produksi yang dilandasi dengan institusi pendidikan dan penelitian yang kuat dan SDM yang unggul.

Saya berharap Kongres Kebangsaan yang diselenggarakan MPR ini akan melakukan refleksi mendalam tentang dunia kini dan yang akan datang, serta menghasilkan pemikiran dan rekomendasi besar bagi penguatan kebangsaan kita. Tetapi, yang lebih penting lagi adalah langkah-langkah perbaikan apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kehidupan kebangsaan kita ke depan.

***Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.***

# Pidato Kebangsaan Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo



***Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.***

***Salam sejahtera untuk kita semua.***

Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang terhormat ketua MPR RI, Bambang Soesatyo dan para wakil ketua MPR RI. Yang terhormat pimpinan DPR beserta jajarannya. Yang kami hormati pimpinan DPD. Yang kami hormati ketua Forum Rektor Indonesia, Prof. Panut Mulyono beserta seluruh rektor indonesia. Pimpinan mitra lembaga, tokoh-

tokoh bangsa, partai politik, serta teman-teman dari dunia usaha, para tamu undangan Kongres Kebangsaan yang saya hormati.

Hadirin yang budiman.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa, dalam suasana kehidupan bangsa yang masih belum sepenuhnya pulih dari cengkraman covid-19, pada hari ini, tepatnya pada momen historis peringatan Sumpah Pemuda, kita masih diberi kesempatan hidup untuk turut memberikan sumbangsih bagi kebaikan dan kemajuan bangsa melalui Kongres Kebangsaan.

Kongres ini digagas oleh kaum cendekiawan dari berbagai lintas profesi dan institusi, bekerja sama dengan masyarakat politik dan golongan pengusaha yang merasa terpenggil menjadikan krisis pandemik sebagai titik balik semangat gotong royong untuk kebangkitan bangsa.

Sejarah kemanusiaan universal memberi pelajaran berharga bahwa krisis dan katastrofi itu senantiasa berwajah ganda. Di balik kegelapan dan penderitaan yang ditimbulkan, krisis juga bisa menunjukkan cahaya, kesejatan dan kekuatan



umat manusia. Kata “krisis” sendiri berasal dari bahasa Yunani, “krisis” (kata benda) atau “krino” (kata kerja), yang berarti “menarik batas” atau “titik balik”. Dalam momen gelap bahaya katastrofi, selalu ada cerah peluang untuk menarik garis batas antara kejahiliah dan keberadaban; sebagai titik balik untuk menyehatkan dan memajukan kehidupan.

Hari ini, 93 tahun yang lalu, sekumpulan pemuda-pelajar dari berbagai latar etnis, agama, dan kepulauan berikrar di Jakarta, untuk mempertautkan keragaman menjadi kesatuan kekuatan dengan mengaku: “Bertumpah darah satu, tanah air Indonesia; berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia”. Sumpah ini pun harus kita lihat sebagai monumen dari rangkaian respon kaum inteligensia sadar politik terhadap krisis sosial-ekonomi-politik di Hindia Belanda pada masa itu.

Berakhirnya Perang Dunia I, suasana kehidupan di Tanah Air memasuki masa krisis dan katastrofi yang akut. Hal itu ditandai oleh memburuknya kehidupan perekonomian akibat disrupsi perang, krisis industrial dan gagal panen, bersamaan dengan cengkraman pandemik influenza (flu Spanyol), yang mulai merebak sekitar akhir Perang Dunia I (1918) hingga awal 1920-an, yang memakan korban kematian hingga 4,6 juta jiwa.

Suasana katastrofi tersebut membangkitkan semangat perjuangan emansipasi di kalangan kaum terpelajar Bumi Putera- baik yang mengenyam pendidikan di Tanah Air maupun di luar negeri.

Meningkatnya kesadaran politik emansipatif di kalangan kaum terpelajar itu, bagi pemerintahan kolonial Belanda dilihat sebagai penambah beban kesulitan ekonomi, yang harus ditumpas dengan rezim keamanan yang lebih represif. Aksi-reaksi dari dinamika itulah yang memperkuat solidaritas kaum terjajah yang membangkitkan semangat persatuan kebangsaan yang pada gilirannya membuka jalan bagi kemerdekaan Indonesia.

Bila kaum terpelajar, sebagai minoritas kreatif pada masa kolonial, mampu bangkit merespon tantangan zaman, lantas apa respon kaum terpelajar dan penggiat ekonomi-politik saat ini terhadap krisis kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang muncul bersamaan dengan pandemi covid-19? Hari ini berkongres untuk menjadikan pandemi-19 sebagai batu uji untuk menakar kekuatan dan kelemahan kita sebagai bangsa, seraya mencari jalan keluar untuk memajukan peradaban bangsa.

## Hadirin yang Budiman

Karena virus merupakan manifestasi otentisitas alam yang tak bisa dikendalikan dengan sogokan dan manipulasi pencitraan, virus bisa membantu kita mengenali kesejatian dan pencapaian pembangunan kita: seberapa kuat ketahanan nasional kita, seberapa tinggi mutu peradaban kita, seberapa dalam pembudayaan nilai Pancasila kita.

Dalam usaha menakar kesejatian dan pencapaian pembangunan itu, harus kita pahami dulu hakikat pembangunan Indonesia sebagai pengemban moral lagu kebangsaan Indonesia Raya: “bangunlah jiwa, bangunlah badannya”. Alhasil, yang dipedulikan dalam pembangunan bukan hanya pertumbuhan material, tetapi juga perkembangan kejiwaan. Bukan hanya infrastruktur “keras” (sarana fisik), tapi juga infrastruktur “lunak” (keadaban, pendidikan, Kesehatan).

Selain itu, dalam aktivitas pembangunan harus juga dipastikan bahwa yang semarak berkembang di sini bukan sekadar “pembangunan di Indonesia”, yang pelakunya bisa saja bukan orang Indonesia atau tidak berjiwa Indonesia, dengan hasil pembangunan yang dapat menyingkirkan dan mengasingkan bangsa sendiri. Yang harus lebih giat kita kembangkan adalah “pembangunan Indonesia”. Pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat Indonesia melalui pengolahan dan peningkatan nilai tambah sumber daya Indonesia dengan sepenuh jiwa raga Indonesia.

Dengan demikian, pembangunan pada hakekatnya merupakan usaha berkelanjutan dalam pemajuan mutu peradaban dengan cara meningkatkan kualitas hidup, dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional: menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, berlandaskan Pancasila. Adapun kualitas hidup dan peradaban ditinggikan melalui pemajuan kapabilitas dalam “tata nilai” (mental-kultural), “tata Kelola” (institusional-politikal), dan “tata sejahtera” (material-teknologikal). Tata nilai membangun kekuatan jiwa budaya kewargaan yang inklusif. Tata sejahtera membangun kemakmuran material yang inklusif. Tata Kelola menjadi *enabler*, yang mendukung pembangunan rohani dan jasmani, melalui praksis politik yang inklusif.

Pandemi Covid-19 membantu kita mengenali kekuatan dan kelemahan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila dalam ketiga ranah tersebut. Pada ranah mental-kultural, sisi positif terpancar dari semangat gotong royong yang relatif masih bertahan di tengah masyarakat. *Charity Aid Foundation, World Giving Index 2021*, sekali lagi menobatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia. Sisi negatif terlihat dari dekadensi etis dalam dunia politik, yang termanifestasi dalam polarisasi politik yang terus berkobar di tengah wabah, serta tindak-tanduk segelintir elit yang kurang terpuji dan kurang memiliki empati terhadap suasana kebatinan rakyat yang sedang dirundung malang.

Dengan kata lain, sabuk pengaman ketahanan nasional kita bersumber dari kemampuan kita merawat nilai-nilai Pancasila di jantung masyarakat. Sedangkan titik kerawanan nasional kita ditimbulkan oleh tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam dunia politik. Politik sebagai teknik mengalami pencanggihan, namun politik sebagai etik mengalami kemunduran.

Dalam tata Kelola kelembagaan politik, pandemi mengungkap sebagai retakan dan ketidakefektifan dalam sistem pemerintahan kita. Perselisihan mengemuka dalam relasi antar tingkat pemerintahan serta praktik tata kelola yang bersifat sporadis tanpa mekanisme sistemik. Perubahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi tak membuat postur dan cakupan negara makin ramping, malah makin gemuk. Di masa Orde Baru, besarnya postur dan cakupan negara itu relatif bisa diimbangi oleh kapasitas negara untuk melaksanakan pemerintahan secara efektif, kendati terkesan represif. Di masa Orde Reformasi, efektivitas pemerintahan terkendala oleh banyaknya *veto players* dan “kepentingan partikular” yang menghambat pelayanan publik.

Pergeseran dari negara otoriter-sentralistik ke negara demokrasi-desentralistik dengan euphoria kebebasan individu yang dihadirkan Orde Reformasi juga tak disertai pemenuhan prasyarat fundamental yang menyertai proses desentralisasi dan liberalisasi. Prasyarat yang dimaksud adalah *rule of law*, meritokrasi dan akuntabilitas. Yang terjadi di sini, *rule of law* acap kali ditepikan oleh *rule by law*, meritokrasi ditepikan oleh mediokrasi: akuntabilitas ditepikan oleh watak patrimonialisme dengan tendensi personalisasi kekuasaan.

Bagaimana pun juga tidak ada sistem politik yang sempurna. Maka, dua patokan perlu diperhatikan untuk tata kelola yang baik. Pertama, gerak progres itu memerlukan dukungan stabilitas. Untuk itu, perubahan yang dilakukan jangan sampai merobohkan semua tiang tradisi. Kita bisa belajar dari pengalaman gerak perubahan di negara-negara demokrasi mapan seperti Amerika Serikat, yang memperlihatkan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi tidak sampai merombak struktur dasar konstitusi, dan untuk itu perubahan konstitusi ditempuh dengan acara *addendum*.

Kedua, gerak progres juga memerlukan usaha penyesuaian secara terus-menerus seiring dengan perkembangan zaman. Seperti diingatkan John Micklethwait and Adrian Wooldridge, negara-negara sejagat saat ini berada di tengah pacuan untuk mereinvensi (tata kelola) negara dalam rangka merespon perkembangan globalisasi, disrupsi teknologi, dan persaingan global. Tata kelola negara yang baik harus bisa memberi keseimbangan antara peran negara, peran pasar, dan komunitas. Memimpin pemerintahan, apalagi dalam sistem demokrasi, tak harus dengan cara “mendayung” (*rowing*), yang memerlukan otot aparatur negara yang besar; cukup secara “mengemudi” (*steering*) dengan mengaktifkan segala peran, fungsi dan agensi secara partisipatif dan koordinatif.

Kita bisa belajar dari pengalaman program vaksinasi. Saat program tersebut terlalu memusatkan pada otoritas negara, kurang melibatkan peran komunitas dan dunia usaha, program vaksinasi berjalan lamban. Baru kemudian, setelah berbagai kalangan dilibatkan, program vaksinasi berjalan lebih efektif.

Dalam tata sejahtera, pandemi mengungkapkan kelemahan negara kita setidaknya dalam dua hal. Pertama, kesenjangan yang makin lebar karena pengabaian prinsip keadilan dalam distribusi harta, kesempatan dan privilese sosial. Padahal, diingatkan oleh Richard Wilkinson dan Kate Pickett, ketidakadilan dan kesenjangan lebar bukan hanya buruk bagi yang miskin, tapi juga berbahaya bagi yang kaya. Kesenjangan lebar bisa memicu polarisasi sosial, kecemburuan dan prasangka, memudahkan rasa saling percaya, yang pada ujungnya membawa resiko kemunduran kesehatan fisik dan mental, bahkan bisa merembet pada peluluhan capaian pembangunan secara keseluruhan.

Kedua, Indonesia dengan potensi sumber daya alam yang melimpah justru tak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan dan obat-obatan secara berdaulat. Paradigma ekonomi lama dengan prinsip asal bisa mengimpor dengan harga murah harus diakhiri. Terperangkap dalam prinsip itu membuat kita kehilangan wahana peningkatan kapabilitas belajar untuk mengolah dan mengembangkan nilai tambah potensi sumber daya kita. Tanpa usaha menanam dan memproduksi sendiri dengan penguasaan teknologi sendiri, kita akan terus mengalami ketergantungan dan defisit neraca perdagangan, tak dapat mengembangkan kemakmuran secara luas dan inklusif.

### **Hadirin yang budiman**

Dengan gambaran seperti itu, krisis pandemi bisa menjadi titik balik dalam mengupayakan pembangunan kualitas hidup dan peradaban sebagai pengamalan Pancasila. Bahwa keampuhan Pancasila sebagai ideologi menuntutnya menjadi “ideologi kerja” (*working ideology*) dalam praksis pembangunan. Dengan kata lain, ideologi Pancasila itu menjadi kerangka paradigmatis dalam pembangunan nasional, yang dibudayakan dalam tiga ranah peradaban: ranah nilai budaya (mental-spiritual-karakter) dalam kerangka “tata nilai”, ranah kelembagaan sosial-politik dalam kerangka “tata kelola” (*governance*), ranah material-teknologikal dalam kerangka “tata sejahtera.”

Bersamaan dengan itu, pendekatan dalam mengupayakan pembudayaan Pancasila yang tercermin dalam semangat gotong royong. Dengan kata lain, pendekatannya tidak boleh lagi dikembangkan secara vertikal dengan dimonopoli oleh negara; tetapi harus dikembangkan secara horizontal, dengan melibatkan peran komunitas dan dunia usaha.

Pembudayaan tata-nilai diarahkan untuk mengembangkan kepribadian nasional dan budaya kewargaan yang inklusif. Sebagai nilai inti moral publik, Pancasila bukanlah sebatas bahan hafalan, melainkan nilai hidup yang harus dialami dan dijalani penuh integritas, dengan menjaga konsistensi antara pikiran, perkataan, sikap dan perbuatan; antara keyakinan, pengetahuan, kebijakan dan tindakan.

Karena pembangunan nilai ini harus dibudayakan sejak dini (bahkan sejak buaian), di berbagai ruang (privat, komunitas, dan publik), dijaga sepanjang siang dan malam, dan secara berkelanjutan, maka ada keterbatasan negara sebagai agen pembudayaan nilai. Oleh karena itu, agen sosial yang paling berkompeten untuk mengemban urusan tata nilai adalah komunitas pendidikan. Nilai Pancasila yang semula digali dari nilai-nilai hidup yang tumbuh di berbagai komunitas Tanah Air, sudah sepatutnya dikembalikan ke perawat utamanya. Ada beberapa komunitas inti pembudayaan nilai Pancasila: komunitas sekolah, komunitas agama, komunitas pemukiman, komunitas kerja, komunitas media, komunitas minat-bakat, komunitas orpol dan ormas, serta komunitas adat. Setiap komunitas tersebut memiliki titik tekan dan pendekatannya tersendiri dalam membudayakan nilai Pancasila, namun secara keseluruhan membentuk rantai nilai Pancasila secara holistik dan integral.

Dengan dikembalikan ke komunitas, lembaga-lembaga negara (kecuali lembaga-lembaga kependidikan negara), ketimbang sibuk mengurus sosialisasi Pancasila kepada masyarakat sebagai pemborosan sumber daya yang tidak efektif, lebih baik mengurus pembudayaan nilai di lingkungan komunitas kerjanya sendiri; yakni bagi penyelenggara negara dan jaringan kader kepemimpinan politik. Alhasil, sebelumnya mempancailakan masyarakat, penyelenggara negara harus terlebih dahulu mempancailakan dirinya sendiri.

Adapun lembaga-lembaga negara dengan tugas pembinaan nilai Pancasila, dalam menjalankan tugasnya harus bekerja sama dengan komunitas sesuai dengan kelompok sasaran. Tugas paling penting yang bisa dikerjakan lembaga-lembaga negara tersebut adalah sejalan dengan fungsi negara untuk (menghormati, melindungi, memfasilitasi, dan memenuhi) peran-peran individu dan komunitas dengan membuat pedoman dasar, kerangka regulasi, kode perilaku, fasilitasi, pengukuran dan monitoring, agar pembudayaan nilai yang dilakukan berbagai komunitas tadi memiliki irisan persamaan, koherensi dan jaminan mutu, sehingga secara serempak bisa memenuhi sasaran dan tujuan yang dikehendaki.

Pembudayaan tata-kelola diarahkan untuk mengembangkan kehidupan politik yang inklusif dengan mewujudkan negara hukum yang sistematis “kekeluargaan” (gotong royong), yang mengintegrasikan kekuatan nasional melalui mekanisme demokrasi yang bercita kerakyatan, bercita permusyawaratan dan

bercita hikmat-kebijaksanaan dalam suatu rancang bangun institusi-institusi demokrasi yang dapat memperkuat persatuan negara persatuan dan keadilan sosial negara kesejahteraan.

Agen utama dalam urusan tata kelola ini adalah para penyelenggara negara dan kepemimpinan politik. Adapun prioritas rejim politik-kebijakan tersebut adalah menata ulang sistem demokrasi dan pemerintahan dalam kerangka memperkuat persatuan nasional dan keadilan sosial. Untuk itu, berbagai desain institusi demokrasi dan pemerintahan harus ditinjau ulang. Praktik politik tidak dibiarkan sekadar perjuangan kuasa demi kuasa, namun harus mengemban substansi politik dalam rangka menghadirkan berbagai kebijakan yang andal demi memenuhi visi dan misi negara. Kebijakan politik harus merespons tantangan perbaikan tata kelola mental-kultural (tata nilai), tata kelola sumber daya material (tata sejahtera), serta tata kelola demokrasi dan pemerintahan.

Pembangunan tata-sejahtera diarahkan untuk mengembangkan kemakmuran yang inklusif, dengan mengupayakan perekonomian merdeka; berlandaskan usaha tolong-menolong (semangat kooperatif), disertai penguasaan negara atas “karunia kekayaan bersama” serta atas cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak; seraya memberi nilai tambah atas karunia yang terberikan dengan input pengetahuan dan teknologi. Pemangku utama dalam urusan tata sejahtera ini adalah dunia usaha dan rezim perekonomian, dengan prioritas utamanya mengembangkan perekonomian berbasis semangat tolong-menolong (kooperatif). Dengan semangat itu, politik anggaran harus lebih berorientasi pada kesejahteraan umum. Kemampuan negara untuk menguasai dan mengelola kekayaan bersama serta cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus disehatkan. Mata rantai produksi dari hulu ke hilir jangan sampai terkonsentrasi di satu tangan. Kemakmuran dan pemerataan ekonomi bisa didorong melalui pengembangan kewirausahaan yang dibekali penguasaan inovasi-teknologi, dengan memprioritaskan pengembangan teknologi berbasis potensi dan karakteristik keindonesiaan. Untuk itu, aktivitas riset dan inovasi sebaiknya tidak hanya mengandalkan *push factor* dari lembaga riset negara dan perguruan tinggi, melainkan juga harus menjadi bagian integral dari dunia usaha.

## Hadirin yang Budiman

Demikianlah, pokok-pokok pikiran paradigma Pancasila untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperadabkan bangsa. Setelah lebih dari tujuh dekade Pancasila ditahbiskan sebagai dasar (filsafat) negara, pandangan dunia, norma dasar, ideologi negara, dan kepribadian bangsa Indonesia, masih terdapat jurang yang lebar antara idealitas Pancasila dengan realitas kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.

Melalui kongres Kebangsaan ini kita bertekad untuk mengintegrasikan kekuatan untuk merespon tantangan zaman dengan membudayakan Pancasila dalam tiga ranah kehidupan dan peradaban.

Ini memang bukan tugas yang mudah. Tetapi pengalaman keindonesiaan memberi pelajaran, selama kita punya harapan, dan bersedia menebusnya dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, semesta punya caranya tersendiri untuk membukakan pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Dengan semangat kebersamaan dalam perbedaan, kekuatan energi positif bisa mengatasi kelemahan dan keputusan. Dalam kaitan ini, hendaklah kita mengingat pesan Bung Karno:

“Dan kita harus sabar, tak boleh bosan, ulet, terus menjalankan perjuangan, terus tahan menderita ... jangan putus asa, jangan kurang tabah, jangan kurang rajin. Ingat, memproklamasikan bangsa adalah gampang, tetapi menyusun negara, mempertahankan negara buat selama-lamanya itu sukar. Hanya rakyat yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang saya sebutkan tadi-rakyat yang ulet, rakyat yang tidak bosan, rakyat yang tabah ... - hanya rakyat yang demikianlah dapat bernegara kekal dan abadi. Siapa yang ingin memiliki mutiara, harus ulet menahan-nahan nafas, dan berani terjun menyelami samudera yang sedalam-dalamnya.”

Akhirnya, saya ingin menyampaikan penghargaan, terima kasih tak terhingga kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, kepada Forum Rektor Indonesia, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Yayasan Suluh Nuswantara Bakti, Himpunan Pengusaha Muda



Indonesia, serta Harian Kompas yang telah bekerja sama Aliansi Kebangsaan melaksanakan “Diskusi Serial” selama dua setengah tahun lebih. Para Narasumber dan berbagai pihak lainnya telah menyampaikan berbagai pemikiran dan gagasan dalam forum kebangsaan ini.

***Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.***

# Sambutan

## Ketua Forum Rektor Indonesia

Prof. Ir. Panut Mulyono



***Assalamualaikum Warahmatullahi  
Wabarakatuh***

*Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita  
semua, Shaloum, Om Swastiastu Namu Buddhaya,  
Salam Kebajikan*

**Yang terhormat:** Presiden RI, Bpk Ir. H. Joko Widodo

Yang saya hormati: Pimpinan MPR RI, H. Bambang  
Soesatyo, SE, MBA. Pimpinan DPR RI, Dr.(H.C.)

Puan Maharani Pimpinan Aliansi Kebangsaan, Pontjo sutowo Pimpinan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Prof. Satryo S. Brodjonegoro, Pimpinan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Dr. Alfita Salam, APU. Pimpinan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bpk Mardani H. Maming, Pimpinan Media Kompas.

**Bapak/Ibu Para tokoh bangsa dan hadirin yang berbahagia,**

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk hadir dalam Kongres Kebangsaan dengan suasana yang khidmat dan penuh rasa cinta pada tanah air, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Forum Rektor Indonesia (FRI) merasa bangga menjadi bagian dari penyelenggara Kongres Kebangsaan “Ikhtiar Memperadabkan Bangsa” bersama dengan Aliansi Kebangsaan, MPR-RI, AIPI, HIPMI, dan Media Kompas yang diselenggarakan pada peringatan momentum bersejarah yang amat penting

dalam perjalanan Republik Indonesia tercinta: Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2021.

### **Bapak/Ibu hadirin sekalian yang berbahagia,**

Saya ingin mengajak kita semua untuk menengok sejenak apa yang telah diikhtiarkan oleh para pendahulu kita, para pejuang bangsa, dalam memperadabkan bangsa.

Pada hari ini, 93 tahun yang lalu kaum muda Indonesia berkumpul dalam Kongres Pemuda Kedua. Pada kesempatan tersebut Mohammad Yamin menyampaikan bahwa terdapat lima faktor yang memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Selanjutnya para pemuda membahas masalah pendidikan dan menyepakati bahwa anak – anak harus mendapat pengetahuan kebangsaan. Harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan dirumah. Anak – anak wajib dididik secara demokratis. Di Kongres ini para pendahulu kita yang masih berada di bawah penjajahan bersepakat bahwa untuk memajukan bangsa, kita harus merdeka. Untuk dapat merdeka, kita harus bersatu. Pendidikan menjadi cara utama untuk membangun pengetahuan dan wawasan kebangsaan sebagai bekal menuju kemerdekaan.

Pada babak sejarah bangsa selanjutnya, pada masa pembentukan pemerintahan Indonesia, disepakati kontrak sosial bahwa tujuan dibentuknya negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan Pancasila.

### **Hadirin sekalian yang saya banggakan,**

Saat ini di era kemerdekaan tentu kita menghadapi tantangan yang berbeda dengan para pendahulu kita. Bangsa yang beradab adalah bangsa yang selalu memikirkan kemanusiaan, kesejahteraan, daya saing, dan memberikan kemanfaatan bagi warga kebanyakan, dan bangsa lain. Bangsa yang beradab selalu mengingat masa lalu dan tak lupa pula mengeksplorasi

kesempatan dan tantangan masa depan. Bangsa yang beradab adalah bangsa yang adil pada bangsa lain, juga adil pada lingkungan demi masa depan dunia. Tantangan yang kita hadapi saat ini berbeda, definisi keberadaban mengalami perubahan, namun perjuangan bangsa Indonesia senantiasa dijiwai pada nilai-nilai dasar negara kita, Pancasila.

Sejalan dengan tujuan pembangunan Indonesia, kami para pimpinan perguruan tinggi Indonesia yang tergabung dalam FRI berkomitmen untuk membangun peradaban mulia yang mampu mewujudkan kesejahteraan bersama yang berkeadilan untuk menjadi bangsa maju terkemuka dengan kemampuan unggul di bidang teknologi yang berdaya saing.

Momentum Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 pada 28 Oktober 2021 hari ini sepatutnya kita jadikan sebagai momentum kebangkitan kembali bangsa di tengah dunia yang sedang didera pandemi hebat yang memaksa kita melakukan langkah transformasi besar secara sistematis dan radikal dengan menjadikan Pancasila sebagai Paradigma untuk Membangun (Kembali) Indonesia.

FRI mendukung upaya untuk menjadikan Pancasila bukan semata-mata menjadi slogan dan retorika kosong yang hampa makna, melainkan secara sungguh-sungguh ditransformasikan menjadi Tata-Nilai (di ranah mental-kultural), Tata-Kelola (di ranah institusional-politikal) serta Tata-Sejahtera (di ranah material-teknologikal). Kami meyakini pendekatan “Tiga Ranah Peradaban” dengan Paradigma Pancasila ini dapat digunakan sebagai tolok ukur paradigmatis dalam menguji dan mengembangkan sistem ketahanan dan pembangunan nasional kita.

Pembangunan yang berkelanjutan menjadi tanggung jawab kita pada saat ini. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi kunci utama menuju peradaban mulia dan kemajuan bangsa. Iptek akan menghubungkan sumber daya manusia dan sumber daya alam agar dapat memberikan kemanfaatan yang lebih bernilai ekonomi dan menyejahterakan. Maka sangat tepat target pemerintah pada tahun 2045 menetapkan kontribusi Iptek pada PDB sebesar 1,5% sampai dengan jangka panjang menjadikan Indonesia

sebagai pusat Iptek Asia Pasifik, khususnya di bidang kemaritiman dan biodiversitas.

FRI bersama dengan berbagai elemen bangsa lainnya siap untuk berkolaborasi melakukan orkestrasi membangun Peradaban Mulia yang mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sosial serta mewujudkan kemajuan bangsa dengan kemampuan unggul di bidang teknologi yang berdaya saing.

### **Bapak Ibu yang saya hormati,**

Sembilan puluh tiga (93) tahun yang lalu, lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk pertama kalinya diperdengarkan di forum Kongres Pemuda untuk menggelorakan rasa cinta tanah air dan bangsa dan menyerukan semangat persatuan untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Saat ini, lagu kebangsaan kita masih terus menggetarkan hati kita, dalam mengisi kemerdekaan, terus bergerak maju untuk Indonesia yang berperadaban mulia: bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya!

Maka, mari kita terus bergandengan tangan, bersinergi lintas bidang dan lintas generasi demi kejayaan Tanah Air, memajukan bangsa dan negara Indonesia. Mari belajar sepanjang hayat, melakukan inovasi tiada henti, dan meningkatkan kualitas diri untuk membangun negeri. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, meridhoi usaha kita. Aamiin. Terima kasih, ada khilaf dan salahnya mohon maaf. Salam sehat untuk kita semua.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi, Om santi santi santi om, Namo Buddhaya, Salam kebajikan*

### **Ketua Forum Rektor Indonesia**

Prof.Ir. Panut Mulyono, M.Eng.,D.Eng.,IPU,ASEAN Eng

# Sambutan

## Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia

### DR. Alfitra Salamm APU



*Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

Yang sama-sama kita banggakan Presiden RI Bapak Ir. Joko Widodo.

Yang Kita hormati Ketua MPR RI Bapak Soesatyo,

Wakil Ketua MPR RI Bapak Dr. Syarifuddin Hasan, Bapak Dr. Noer Wahid yang hadir secara virtual.

Yang saya hormati Ketua Kelompok DPD RI Bapak Tamsil Linrung,

Ketua Aliansi Kebangsaan Bapak Pontjo Sutowo.

Yang saya hormati Ketua Forum Rektor Indonesia, Prof. Ir. Panut Mulyono dan bapak ibu rektor di ruang ini, wakil Ketua HIPMI Bapak Akbar Himawan Buchari.

Dengan penuh rasa syukur sebagai Ketua Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPSI) mengajak kita semua untuk memanjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya pada hari ini kita berkumpul bersama membahas dinamika bangsa sebagai konsekuensi kita dalam berdemokrasi.

Di awal sambutan, saya mengapresiasi atas diselenggarakannya Kongres Kebangsaan yang dilaksanakan oleh Aliansi Kebangsaan yang bertepatan juga dengan Perayaan Sumpah Pemuda. Semoga kongres ini dapat memperkuat kembali semangat kita menjaga persatuan bangsa sebagaimana yang menjadi perjuangan para pendiri bangsa di masa lampau. Bapak dan Ibu yang saya hormati, secara teoritis, normatif dan prosedur, Indonesia sudah dapat disebut

sebagai negara demokrasi yang sudah terkonsolidasi. Indonesia memiliki konstitusi sebagai dasar negara, hak dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan berpendapat bagi setiap warga negara dan dijamin oleh undang-undang. Memiliki partai politik sebagai sarana aspirasi politik serta melaksanakan pemilu secara periodik oleh penyelenggara Pemilu yang independen.

Meksipun demikian, kita semua perlu menyadari Indonesia masih menghadapi tantangan yang tidak ringan. Dalam kenyataannya, tujuan berdemokrasi kerap menemui berbagai tantangan. Konstitusi sebagai panduan kita dalam berbangsa dan bernegara terkadang masih ingin dikoyahkan oleh kepentingan-kepentingan politik. Kebebasan menyatakan berpendapat dan berkumpul terkadang harus berhadapan suasana kebebasan yang mengalami euphoria. Sehingga kebebasan yang dimiliki warga negara kerap disalahgunakan untuk melemahkan negara bahkan menjadi pelemah ikatan sosial yang oleh *founding fathers* yang telah membangunnya dengan baik. Dalam ranah politik tantangan konstitusi demokrasi Indonesia juga semakin nyata, cita-cita untuk mendorong agar negara yang berperadaban, ditunjang oleh berfungsinya institusi demokrasi masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Oleh karena itu, Kongres Kebangsaan yang digagas Aliansi Kebangsaan dengan tema Ikhtiar Memperadabkan Bangsa sangat sesuai dengan cita-cita kita semua. Cita-cita untuk membangun institusi demokrasi yang profesional, bersih dan jujur dalam mengemban amanah rakyat, saya kira menjadi perhatian kita semuanya. Kita yakin dengan semangat yang sama, cita-cita untuk lahirnya institusi demokrasi yang berkualitas dapat diwujudkan dalam pemilihan umum ala Indonesia. Sehingga, kita dapat melahirkan politis-politis visioner dalam mewujudkan cita-cita bernegara yaitu mewujudkan adanya makmum.

Peradaban bangsa dalam berpolitik menjadi kunci keberhasilan bernegara. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berikhtiar untuk mencari yang terbaik bagi republik yang kita cintai, agar tata kelola dalam bernegara selain demokratis, juga bisa menghadirkan sistem politik yang baik dengan lahirnya para pemimpin yang dikehendaki rakyat. Sejarah telah membuktikan sistem politik yang buruk dan lemah serta tidak berkeadaban akan melahirkan aktor-aktor politik yang *bad person in a good system*. Sistem politik yang kita miliki bisa saja dapat dijaga, dipertahankan, diperkuat, namun akan sia-sia jika tidak diikuti dengan kokoh

nilai-nilai keadaban dan komitmen terhadap etika bagi aktor-aktor politik bernegara. Tugas ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai ikhtiar memperadabkan bangsa. Kita seperti masih perlu berjuang melakukan perbaikan dalam banyak hal. Namun bagi pengurus pusat AIPI yang merupakan organisasi profesi kumpulan ilmuwan politik seperti akademis, peneliti bahkan praktisi memandang bahwa hal yang paling *urgent* untuk diperbaiki saat ini adalah membangun tungkur etika politik bagi setiap kalangan masyarakat, elit, dan pemerintahan serta penguatan kelembagaan institusi demokrasi.

Penguatan kelembagaan institusi-institusi, perbaikan demokrasi salah satunya dapat dilakukan melalui Pemilihan Umum, kita berharap Pemilu di masa datang 2024 dapat berjalan lancar dan sukses. Kami yakin dengan skema politik serentak 2024 yang berintegritas dan damai, berkelanjutan, demokrasi kita akan semakin membaik. Sebagai bagian ikhtiar untuk mencapai perbaikan ini, AIPI memandang bahwa agenda Pemilu harus tuntas tahun 2024. Oleh karena itu, AIPI memandang agar penyelenggaraan 2 Pemilu, Pemilu Tahun 2024 untuk memilih Presiden bersamaan Pemilu legislatif DPR, DPRD, dan DPD diselenggarakan dengan mempertimbangkan pelaksanaan pemilihan Pilkada serentak 2024 yang telah diamanatkan oleh undang-undang pada November 2024. Untuk itu, skema waktu penyelenggara Pemilu Nasional 2024 sebaiknya dilaksanakan pada kerangka waktu yang sama pada tahun 2024. Menurut pertimbangan AIPI, February 2024 bisa menjadi waktu yang tepat, tujuannya agar Pilkada 2024 tetap pada bulan November 2024 sehingga tidak perlu melakukan perubahan umum. Demikianlah sambutan kami, semoga gagasan ini menjadi bahan kajian untuk menjadi rekomendasi Aliansi Kebangsaan sebagai ikhtiar bersama memperadabkan bangsa.

***Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,***



## Sambutan Wakil Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari SH



*Assalamualaikum warrahmatullahi  
wabarakatuh,*

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Bapak Presiden RI, Joko Widodo.

Yang kita hormati Ketua MPR RI Bapak Soesatyo.

Yang kita hormati Ketua Aliansi Kebangsaan Bapak  
Pontjo Sutowo.

Yang kita hormati bapak ibu tokoh bangsa.

Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan kata sambutan dalam forum yang sangat terhormat ini. Hadir dan berkumpulnya dalam forum ini merupakan suatu bentuk kepedulian kita terhadap bangsa Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Berangkat dari sejarah berdirinya suatu bangsa yang besar pasti tidak lepas dari berkumpulnya para negarawan untuk membicarakan ide dan gagasan ke depan. Pada tanggal 28 Oktober, lahirnya para gagasan pemuda yang sampai hari ini masih menjadi identitas yang sangat melekat. Sumpah Pemuda merupakan momen penting bagi sejarah bangsa Indonesia. Momen tersebut menjadi penanda komitmen tegas, untuk arah perjuangan bangsa yang diikrarkan oleh pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 silam. Isi Sumpah Pemuda sangat menarik untuk menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara.

Berbicara tema besar kita dalam forum terhormat ini: Ikhtiar Memperadabkan Bangsa. Mendiskusikan peradaban memang membutuhkan tenaga serta pengorbanan yang besar, dimana suatu bangsa yang beradab akan

selaras dengan kemajuan bangsa. Beradab dalam ekonomi, beradab dalam politik dan serta beradab di kehidupan masyarakat. Yang sesuai dengan gagasan-gagasan para negarawan kita yaitu menciptakan masyarakat yang madani adil dan makmur. Berangkat dari kondisi hari ini, memang kita masih selalu memberikan sumbangsih yang terbaik sebagaimana kita melihat sudah mulai lunturnya rasa cinta tanah air serta hilangnya rasa nasionalisme. Para generasi muda masa depan memiliki tanggung jawab besar terhadap bangsa ini. Seperti mengutip Ir Soekarno mengatakan “Perjuanganku lebih muda karena melawan penjajah. Namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri”. Hari ini, pepatah itu terlihat secara jelas di hadapan mata kita sebagai pemuda dan generasi yang optimis, kita akan selalu melakukan terbaik. Sebagaimana kita ketahui bonus demografi akan terjadi di tahun 2030. Pada tahun itulah jumlah tahun produktif mencapai 64% dari total penduduk di Indonesia. Bonus ini dapat menjadi momentum Indonesia menjadi negara maju, dimana kita akan dihadapkan pada dua kemungkinan; membuka peluang tenaga kerja, perkembangan ekonomi yang pesat, pengelolaan tata pemerintahan yang baik serta kemajuan bangsa di bidang politik. Namun, apabila kita tidak siap maka itu akan menjadi membludaknya angka generasi muda yang tidak produktif. Kualitas SDM yang tidak seimbang maka oleh karenanya pemerintah sangat diharapkan dalam mempersiapkan momentum yang besar ini.

Di lain sisi, bangsa Indonesia mencoba membangkitkan ekonomi di kala pandemi melanda seluruh dunia, menjadi PR besar yang akan dilalui. Sebagai inovasi kreativitas, generasi muda dan masyarakat dituntut untuk selalu berpikiran maju. Sudah satu tahun lebih perekonomian kita dilanda pandemi. Poran-poranda yang tidak terelakkan, dimana semua butuh akan jaminan hidup memiliki kepastian. Pemulihan ekonomi yang paling berdampak di bidang sektor UMKM. Lesunya dunia UMKM sangat berdampak besar pada perekonomian nasional. Karena segmen ini memiliki investasi yang tinggi terhadap negara kita. Dalam catatan 84% UMKM telah hidup kembali dalam mendorong kebangkitan ekonomi bangsa. Dan ini akan selalu menjadi pusat perhatian dimana UMKM Indonesia dapat bersaing dengan dunia, dengan kemajuan pesat teknologi. HIPMI siap untuk membantu pemerintah dalam membangkitkan UMKM dengan berbagai program-program. HIPMI juga siap berkolaborasi dengan seluruh *stakeholder* yang ada, mendorong percepatan investasi agar pertumbuhan ekonomi dapat bergerak

dengan cepat sesuai dengan arahan Bapak Presiden RI. Dalam upaya mengatasi pandemi, solidaritas dan keterlibatan kita bersama untuk saling mendukung menghadapi krisis Covid-19, dimana kasus Covid-19 di Indonesia sudah mulai mengalami penurunan dengan ketaatan masyarakat untuk selalu menganjurkan protokol kesehatan yang tepat. Gencarnya pemerintah dalam mengkampanyekan vaksinasi di seluruh penjuru Indonesia sebagai upaya positif telah terlaksana dengan baik, dimana sudah hampir 112 juta orang telah divaksin. Ini merupakan kemajuan dari kita. Negara-negara lain memiliki tingkat Covid-19 yang tinggi, maka oleh karena itu menjaga konsisten kita dalam menekan angka Covid-19 agar terus turun. HIPMI mengajak semua kita untuk bersatu dan bersinergi dalam menyelesaikan vaksinasi nasional serta membantu pemerintah dalam meningkatkan ekonomi.

Saya merasa sangat bangga berada di sini, dimana kita masih prihatin dan memberikan ide pemikiran kita terhadap bangsa. Serta mengapresiasi kegiatan ini agar selalu tumbuh dan mengakar bagi generasi muda di masa yang akan datang. Pengusaha pejuang, pejuang pengusaha!

***Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,***

## TESTIMONI KEBANGSAAN KAPOLRI

Diwakili Irjen Pol. Drs. Suntana M.Si



***Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,***

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salom, om swastiastu, namo buddhaya, salam presisi.

Yang kami hormati dan banggakan Bapak Presiden RI Joko Widodo.

Yang kami hormati Ketua MPR Bapak Bambang Soesatyo beserta unsur pimpinan MPR.

Yang saya banggakan senior saya, Pak Pontjo sebagai Ketua Aliansi Kebangsaan. Yang kami hormati dan muliakan bapak-bapak Forum Rekor.

Ijinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Kapolri karena ada kegiatan lain. Saya dalam kesempatan ini, bapak kapolri memberikan acara sambutan dalam rangka Kongres Kebangsaan dalam tema Ikhtiar Memperadabkan Bangsa. Tentunya, kemerdekaan ini adalah didapat dari perjuangan yang berat dan sangat panjang, perjuangan tersebut tidak akan lepas dari peran pemuda dan pemudi dan para pendiri bangsa. UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dan Pancasila juga sebagai alat pemersatu bangsa, telah membuktikan dan memberikan kita sebuah pemahaman tentang hakikat persatuan dan kesatuan. Pancasila sebagai ideologi bangsa mengandung makna yang holistik dan mendalam. Ideologi Bangsa Indonesia, Pancasila pada hakikatnya adalah tujuan hakiki dari bangsa Indonesia yang memiliki berbagai dimensi untuk mencapai tujuan yang paripurna. Tujuan paripurna yang hendak dicapai yaitu terwujudnya bangsa dan negara Republik Indonesia yang adil dan makmur. Yang harus kita

sepakati itu bukan slogan atau motto atau simbolis tapi juga bukan suatu mimpi yang kita tidak bisa capai. Tetapi, tujuan ini memang seharusnya diperjuangkan oleh elemen bangsa. Kita telah membuktikan, di masa pandemi Covid-19 saat ini, atas kerja rekat seluruh warga negara Indonesia, kita telah berhasil melalui masa yang kritis dalam Pandemi COVID-19. Momentum ini harus kita jadikan modal dalam merajut kebersamaan dan sinergi dengan tema semua pihak masyarakat untuk menghadapi berbagai cobaan bangsa ini. Kepolisian Republik Negara Indonesia, adalah salah satu pilar kekuatan bangsa yang bertanggung jawab hal pemeliharaan Kamtibmas.

Kami mengajak seluruh pemuda pemudi dan seluruh bangsa Indonesia untuk melawan radikalisme dan gerakan intoleransi, demi mewujudkan Indonesia yang berbhineka berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah mencatat, khususnya pada peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, lahir sebuah perjuangan pemuda untuk bangsa ini sebelum bangsa Indonesia merdeka. Pemuda dan Pemudi kala itu menjadi lokomotif perjuangan yang berhasil meniupkan angin perubahan untuk meraih kemerdekaan. Saat itu pemuda nusantara bertekad untuk mempersatukan dan mewujudkan cita-cita kebangsaan. Mereka datang mewakili etnis dan entitas tradisional dan kedaerahan. Perbedaan dilupakan dan diikat oleh simpul persatuan. Sehingga akhirnya melahirkan konsensus bersama untuk membuat bangsa dan negara yang diberi nama Sumpah Pemuda.

Sumpah Pemuda Ini menjadi titik balik bagi persatuan dan kesatuan, yang akhirnya dipupuk oleh pemuda pemudi hingga mencapai puncak pada saat kemerdekaan yang kita raih pada tahun 1945. Namun perjuangan pemuda pemudi belum berhenti sampai di situ. Kemerdekaan adalah awal bagi para pemuda pemudi untuk terus melihatkan perannya agar bisa mengisi kemerdekaan dengan baik serta membuat Indonesia menjadi bangsa, negara yang unggul dibandingkan negara-negara yang lain. Memang tidak mudah untuk mewujudkan itu semua, banyak tantangan dan rintangan yang harus dihadapi terutama dalam tubuh pemuda pemudi itu sendiri, apalagi yang kita tahu ditambah dengan arus globalisasi yang masif, yang tak bisa dibendung. Perlu diingat tantangan anak muda di masa lalu berbeda dengan masa sekarang. Seperti yang kita ketahui, Indonesia menghadapi bonus demografi. Satu sisi bonus demografi memiliki

keuntungan karena jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dan market pasar bagi produk hasil produksi. Tetapi di sini lain bonus demografi bisa jadi bencana demografi jika pemuda yang jumlahnya sangat banyak ini belum dibekali dengan kemampuan personil yang bisa memberikan kontribusi pemuda untuk pembangunan bangsa dan negara. Untuk tidak menjadikan pemuda menjadi bencana demografi, saya menghimbau pemuda pemudi Indonesia menjadi pemuda pemudi emas yaitu pemuda pemudi yang energik., masif, dan akademik.

Polri sangat berharap tentunya pada tahun 2045, Indonesia diharapkan menjadi Indonesia maju, pemuda emas, Indonesia emas dan Indonesia makmur. Akhir kata saya mengucapkan selamat dan sukses atas kegiatan Kongres Kebangsaan ini yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Dengan semangat Sumpah Pemuda, kita terus piara semangat dan janji kebangsaan kita.

***Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,***

## TESTIMONI KEBANGSAAN PBNU

### Wasekjen PBNU Dr. Imdadun Rahmat



***Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,***

Yang saya hormati Ketua MPR RI Bapak Bambang Soesatyo.

Yang saya hormati Pimpinan DPR RI yang hadir pada kesempatan pagi ini.

Yang saya hormati Ketua Aliansi Kebangsaan, Pak Pontjo Sutowo.

Yang saya hormati para tokoh bangsa dan para senior yang hadir pada siang hari ini serta hadirin dan hadirat yang hadir langsung maupun melalui platform Zoom.

Izinkan saya menyampaikan pokok-pokok pikiran pagi hari ini. Di kalangan umat Islam Indonesia, bagi khusus kaum santri dikenal kalimat “mencintai tanah air adalah bagian dari keimanan”. Aluwaton dapat dimaknai tanah air tempat kita hidup tetapi juga bisa dimaknai bangsa, sekumpulan masyarakat yang memiliki cita-cita bersama dan mempunyai komitmen, dan konsensus untuk hidup bersama sebagai sebuah kesatuan bangsa. Mencintai tanah air, berkonsekuensi kepada kewajiban untuk menjaga, merawat dan memakmurkan. Kewajiban pertama menjaga, mengharuskan kita punya komitmen untuk melawan hal yang mengganggu bangsa kita. Oleh karena itu NU mengikrarkan pada tahun 1984 bahwa bentuk NKRI adalah final, bahwa Pancasila sebagai payung bersama kita adalah final, artinya kita akan menolak siapa saja kelompok mana saja yang mempertanyakan atau mengganggu dua konsensus kebangsaan kita. Ini adalah konsekuensi cinta yang pertama. Kedua, mencintai adalah memakmurkan. Oleh

karena bangsa harus terus berkomitmen dengan spirit nilai-nilai luhur bangsa kita, nilai-nilai spirit keagamaan untuk memajukan, membangun bangsa kita kepada cita-cita yang telah ditetapkan semenjak kemerdekaan bangsa kita. Kalimat Hubbulwaton minal iman, bukan teks atau quran juga bukan hadits, tetapi ini adalah kalam hikmah yang disarikan oleh para ulama dari pesan nilai al quran dan hadits sendiri. Oleh karenanya, kalimat hubbulwaton minal iman menyemangati dan menjadi pengikat, menjadi pesan keagamaan yang sangat mendalam bagi umat islam khususnya kaum santri untuk berkontribusi bagi bangsa kita.

Baldatun thayyibatun artinya bangsa yang baik, bangsa yang mulia. Dalam kaitan dengan tema kita hari ini adalah bangsa yang berperadaban cita-cita kita bersama. Dalam kaitan tema kita adalah bangsa yang berperadaban. *Wa rabbun ghafur* bermakna meskipun kita menjadi bangsa unggul tetapi kita tetap rendah hati, bangsanya tetap meminta ampun kepada Allah atas berbagai kelemahan dan kekurangan dan atas cita-cita ideal yang belum tercapai. Jadi sebuah bangsa yang unggul tetapi rendah hati.

Di dalam khazanah keulamaan, *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur* ini ditandai dengan beberapa perimeter. Pertama adalah bagaimana sebuah bangsa memiliki komitmen untuk menghormati hak hidup. Seluruh komponen bangsa dapat hidup dengan aman dan tanpa gangguan oleh siapapun. Negara yang baik adalah negara yang mampu menjamin keamanan siapa saja, tanpa diskriminasi. Kedua adalah komitmen untuk menjaga agama, hak berkeyakinan, hak mengamalkan agama harus dijaga oleh sebuah bangsa yang berkeadilan. Ketiga, selain negara berkewajiban untuk melindungi properti dan hak milik siapa saja, negara berkewajiban untuk memakmurkan bangsanya. Jadi negara yang makmur merupakan parameter keadaban.

Selanjutnya, bangsa kita harus terus dididik, bangsa kita harus dicerdaskan, bangsa kita harus dihindarkan dari segala sesuatu yang akan merusak nalar, merusak akal, dan merusak nurani bangsa. Komitmen agar bangsa kita terus melakukan regenerasi, bangsa kita tidak hilang dari sejarah karena kita semua berkepentingan dan berkomitmen untuk membangun generasi yang baik di masa yang akan datang. Terakhir adalah negara yang menjamin *dignity* atau harga diri semua komponen bangsa. Oleh karena itu, tidak boleh ada satupun kelompok yang direndahkan dihinakan. Ini adalah parameter yang dipakai oleh para ulama



untuk menilai apakah Indonesia ini Islami atau tidak. Para ulama mengatakan bahwa walau Indonesia bukan negara Islam, tetapi sudah sangat Islami. Meskipun syariat dan hukum Islam tidak diterapkan secara formal tetapi bangsa dan negara kita sudah syariai. Mengutip Pak Karno mengatakan kita adalah negara bangsa, namun api Islam hidup dan berkobar di jiwa kita. Keenam parameter itulah api Islam yang dimaksud oleh Pak Karno. Demikian juga Bung Hatta mengatakan Islam harus menjadi garam tidak harus menjadi gincu. Islam tidak terlihat tetapi terasa, tidak harus menjadi gincu kelihatan mencolok tetapi tidak terasa apa-apa. *Baladun thayyibatun wa rabbun ghafur* adalah cita-cita kita bersama dan kita berkewajiban untuk menjaga agar cita-cita ini tercapai.

***Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,***

## TESTIMONI KEBANGSAAN PP MUHAMMADIYAH

Dr. Ma'mun Murod Al-Barbasy M.Si



*Assalamualaikum warrahmatullahi  
wabarakatuh,*

**Yang terhormat Bapak Ketua MPR RI dan  
bapak ibu yang hadir di ruangan ini.**

Saya akan mengawali dengan sebuah ayat dalam surat Al Isra ayat 15. Ayat ini dapat menjadi perenungan bagi kita. Ketika kita mencoba meminta ikhtiar apa untuk memperadabkan bangsa. Ikhtiar memperadabkan bangsa dapat ditafsirkan terbalik bahwa bangsa ini sesungguhnya belum beradab. Maka perlu ada ikhtiar yang serius untuk memperadabkan bangsa. Maka ayat al quran yang saya baca dapat dijadikan perenungan. Kirakira artinya bahwa Allah akan dengan mudah untuk menghancurkan sebuah bangsa ketika orang-orang yang hidup mewah di negara tersebut, tidak mau taat kepada Allah SWT. Atau hal yang seperti itu terjadi maka Allah dengan mudah menghancurkan bangsa itu sehancur-hancurnya. Menurut saya dengan merujuk pada ayat itu, negara yang hancur atau dihancurkan karena ada proses yang bersifat sebab akibat, maka menurut saya, negara itu adalah negara yang mencerminkan negara tidak berperadaban. Negara yang tidak berperadaban, mencakup tiga hal: (1) Mengabaikan tuhan nya, (2) Buruk tata kelola nya,(3) hukum dibuat untuk dilanggar, aturan dibuat penuh dengan kompromi-kompromi politik yang terkadang menghancurkan bangsa itu sendiri negara yang abai terhadap kesejahteraannya.

Ada suatu kaidah yang sering dikutip, ukuran keberhasilan seorang pemimpin

ketika memimpin sebuah negara maka ukurannya hanya satu yaitu “mampu tidak mensejahterakan rakyatnya”. Menurut saya tiga hal itu penting untuk perenungan bagi kita semua ketika kita mencoba untuk melakukan ikhtiar memperadabkan bangsa. Menurut saya tiga hal itu kalau dikaji secara mendalam sesungguhnya sudah ada dan dimiliki oleh orang Indonesia atau bangsa Indonesia yaitu apa yang sudah disinggung, yang disebut dengan Pancasila. Pancasila adalah satu bentuk falsafah. Kemudian di era Orde Baru berubah menjadi ideologi negara. Namun, terlepas dari itu semua, Pancasila adalah bentuk kompromi yang luar biasa dari perdebatan panjang falsafah negara pada saat itu, yang kemudian berketetapan untuk menjadikan Pancasila sebagai falsafah negara.

Pancasila adalah bentuk tengahan yang mencoba untuk mencampurkan beragam ideologi yang berkembang pada saat itu. Pancasila juga sekaligus penegasan bahwa Indonesia itu bukan negara agama tapi juga bukan negara sekuler. Indonesia adalah negara agamis, Indonesia adalah negara yang menempatkan agama pada posisi yang sangat penting. Letak pentingnya tergambar dari sila pertama Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 29 ayat 1: negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, ini sebenarnya point penting yang kemudian selama ini diabaikan oleh bangsa kita bahwa negara ini berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tentu tuhan atau nilai-nilai ketuhanan itu semestinya harus dihadirkan dalam pengelolaan negara ini. Sayangnya, yang kerap terjadi, tuhan hanya hadir di ruang-ruang privat terutama dalam konteks *habluminallah* di masjid, di gereja, di wihara, dsb. Tapi, tuhan justru tidak hadir di ruang-ruang publik, ketika pembahasan UU, Perda dan sebagainya. Aturan-aturan yang mengelola hal-hal yang bersifat publik, justru tuhan tidak hadir. Poin penting kalau kita mau melakukan ikhtiar untuk melakukan perbaikan atas bangsa ini. Tentu banyak hal lainnya yang juga perlu menjadi ikhtiar kita bersama.

Sila kedua dari Pancasila mengamanatkan ada sisi-sisi keadilan sosial, sisi-sisi kemanusiaan yang adil dan beradab, ada juga sila ketiga yaitu persatuan Indonesia yang menegaskan kepada kita pentingnya bangsa ini untuk menjaga persatuan, tidak boleh ada kelompok-kelompok di Indonesia yang merasa paling berjasa terhadap kemerdekaan Indonesia. Semua punya andil dalam kemerdekaan Indonesia, maka tidak boleh ada yang merasa paling berhak untuk memiliki

Indonesia. Aturan-aturan yang dibuat terutama dalam konteks politik, seharusnya selaras dengan sila keempat: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada tiga kata yang menarik yang perlu menjadi perhatian. Pertama adalah kata kerakyatan, lalu kemudian hikmah, ada kebijaksanaan di situ, dan kemudian yang terakhir ada musyawarah. Tiga hal yang mestinya menjadi sudah perhatian betul bangsa kita dalam menjalankan roda negara kita semestinya berpijak atau memperhatikan betul sila keempat dari Pancasila. Kira-kira pernyataannya begini, apakah praktek politik yang terjadi di Indonesia saat ini, politik yang sangat liberal, politik yang sangat berbiaya mahal itu sudah sejalan dengan Pancasila kita atau tidak.

Terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini sudah hadir belum? Jadi sebenarnya, kalau acara Kongres Kebangsaan dengan tema Ikhtiar Memperadabkan Bangsa, sebenarnya kita sudah punya Pancasila namun persoalannya selama ini Pancasila hanya hadir sebagai slogan. Itu yang agak konyol. Tidak penting menurut saya untuk menggembar-gemborkan apalagi “penting Pancasila!” “penting NKRI!” kemudian abai. Pancasila tidak dihadirkan dalam konteks apapun. Ikhtiar yang dimaksudkan oleh Pak Pontjo Sutowo dan juga kawan di dalam upaya untuk melakukan pelaksanaan Kongres Kebangsaan ini kembali kepada Pancasila, kembali kepada UUD 1945. InsyaAllah sudah lebih dari cukup untuk membuat Indonesia menjadi negara yang beradab kalau kita kembali pada Pancasila dan UUD 1945.

***Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,***

## TESTIMONI KEBANGSAAN PERWAKILAN REKTOR

Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A



***Assalamualaikum warrahmatullahi  
wabarakatuh,***

Selamat pagi, salam sejahtera. Om swastiastu, namo buddhaya. Salam Kebajikan.

Yang saya hormati Bapak Ketua MPR RI beserta segenap anggota MPR RI, pimpinan DPR dan segenap anggota para penyelenggara Aliansi Kebangsaan, Forum Rektor Indonesia, dan mitra lainnya. Bapak ibu para pemimpin

bangsa dan tokoh bangsa baik yang hadir secara fisik ataupun secara virtual.

Perkenankan saya menyampaikan beberapa pemikiran. Dalam kesempatan ini sebagai bagian dari pengolah pendidikan tinggi di Indonesia. Secara teoritis, suatu ideologi bangsa adalah wujud dari identitas dan solusi. Tinggal implementasi atau prakteknya bagaimana ideologi bisa menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kita harus menjadikan Pancasila sebagai suatu nafas yang mewarnai dan menggerakkan peradaban pada zamannya. Maka dengan kata lain, Pancasila bisa menjadi *enabler* terwujudnya Indonesia Society 5.0 yang Pancasila-lis. Kita dihadapkan pada situasi dimana mayoritas penduduk adalah generasi millennial. Hasil berbagai riset menunjukkan karakter mereka secara psikologis adalah rentan mengalami stress, cenderung labil, dan rentan mengalami disorientasi. Oleh karena itu, tantangan kita bersama, bagaimana mewujudkan mereka sebagai insan berkarakter kuat melalui ideologi kita, terutama dalam penguatan dimensi transendental, dimensi humanisme mereka, cinta persatuan, bijak dalam keputusan dan berbasis musyawarah dan mufakat, dan mampu menjadi pemimpin-pemimpin yang unggul menghadirkan keadilan yang

riil bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tantangan kita, terutama di pendidikan adalah menjadikan Pancasila menjadi jiwa zaman. Bagaimana generasi milenial yang realistis, cenderung praksis dan rentan menjadi ekstrim dapat menghayati keberadaan Tuhan sebagai pengendali kehidupan bagi semua makhluk bukan sekelompok makhluk. Dunia virtual mewarnai kehidupan kita saat ini. Oleh karena itu, tantangan kita bersama, kita ikhtiarkan Pancasila baik secara realitas atau virtual sebagai suatu media yang menguatkan modal sosial, yang sudah lama mengukir dalam kehidupan bangsa ini. Namun, rasa kondisinya semakin terkikis terutama dalam kelompok muda. Terlebih lagi, secara realitas dan virtual, Pancasila harus mewarnai semua cyber dan situs-situs agar menghadirkan insan-insan yang cinta akan kesatuan, bangga akan keberagaman, dan hadir dengan detak nafas yang toleran. Toleran sebagai suatu kesadaran kolektif yang benar, bukan sebagai suatu *false consciousness* yang dihadapkan pada yang sempit. Kami di perguruan tinggi mencoba menghadirkan pendidikan-pendidikan bagi calon-calon pemimpin bangsa yang mampu menghadirkan tujuan kehidupan berbangsa kita yaitu masyarakat yang adil dan sejahtera. Tujuan bangsa bukanlah suatu tujuan yang statis melainkan suatu proses yang *never-ending*.

Tantangan kita bersama, dan kami di pendidikan tinggi sepakat mempunyai komitmen untuk melakukan skenario yang lebih serius dalam modal pendidikan yang menjadikan anak-anak bangsa lebih menghayati kehadiran Pancasila, memahami kehadiran Pancasila dan membumikan dalam praktek-praktek kegiatan mereka sehingga benar-benar menjadi insan yang dapat diharapkan oleh para *founding fathers* kita. Kami di pendidikan tinggi mengucapkan terima kasih atas ikhtiar bersama terwujudnya Kongres Kebangsaan ini. Oleh karena itu, ini menjadi komitmen dan tugas kami untuk bersama-sama melahirkan skenario yang lebih sesuai dengan semangat ini. Demikian, mudah-mudahan pandangan singkat ini membangkitkan semangat untuk bersama bersatu melahirkan suatu kehidupan Pancasilais yakni sesuai dalam dunia yang lebih sesuai dengan semangat ini.

***Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,***

# TESTIMONI KEBANGSAAN BUDAYAWAN

Rm. Prof. Dr. Franz Magnis Suseno, S.J



Sembilan puluh tiga tahun yang lalu ratusan pemuda membuktikan sesuatu yang luar biasa, oleh banyak bangsa lain di dunia belum berhasil dirampungkan bahwa ratusan komunitas etnik budaya dan agama di tanah nusantara betul-betul menjadi satu bangsa-bangsa Indonesia. Sampai hari ini, bangsa Indonesia tetap kokoh bersatu, akan tetapi sekarang persatuan ditantang bukan oleh musuh dari luar melainkan Covid-19. Yang ditantang adalah solidaritas

bangsa. Mari kita jujur, juga sebelum Covid-19, keadilan sosial bagi seluruh rakyat masih belum tercapai. Di antara kita ada yang bisa *shopping* ke Hongkong dan Los Angeles. Sedangkan 50% bangsa belum juga aman sejahtera, 10% bahkan masih terjerumus ke dalam kemiskinan absolut. Sekarang, Covid-19 mengancam menjerumuskan mereka ke dalam kemiskinan yang lebih serius lagi. Maka sekarang saatnya, kita membuktikan bahwa janji Pancasila bukan omong kosong. Kita tidak boleh membiarkan 50% bangsa tenggelam. Teman-teman, kita jangan menipu diri, ancaman terbesar terhadap persatuan bangsa, bukan macam-macam ideologi melainkan korupsi. Kok bisa, kok tidak malu, masih memperkaya diri dengan mencuri dari bantuan sedikit yang disediakan bagi mereka yang membutuhkan. Itu busuk! Teman-teman, ancaman Covid-19 mengingatkan kembali, kita hanya kuat kalau semua sejahtera, kita hanya beradab kalau kita tidak meninggalkan siapapun dalam kemelaratan. Sekarang saatnya untuk membuktikannya.

## TESTIMONI KEBANGSAAN TOKOH PEREMPUAN

Yayasan Cahaya Guru - Henny Supolo



*Ibu dan bapak yang saya hormati. Selamat Pagi.*

Terima kasih khususnya kepada Aliansi Kebangsaan yang telah memberikan kesempatan sangat menyenangkan di pagi ini. Maafkan saya tidak bisa mengikuti secara langsung karena masih berada dalam karantina.

Topik memberadabkan bangsa, saya sangat pandang strategis, kontekstual dan mengandung makna simbolik karena dilangsungkan di dalam gedung ini. Dari gedung ini seharusnya setiap langkah memperlihatkan peradaban. Keputusan diambil berdasarkan nilai-nilai yang telah kita sepakati bersama yaitu nilai Pancasila dengan tata kelola yang tepat untuk kesejahteraan, kenyamanan, dan keamanan bersama, tidak boleh ada yang tertinggal. Artinya pula, perlu pelibatan masyarakat dalam prosesnya dan untuk pelibatan setiap penyelenggara negara harus memiliki kemampuan mendengarkan, melakukan refleksi, dan bercermin dari suara rakyat. Dibutuhkan kerendahan hati untuk bisa melakukannya.

Ki Hajar Dewantara menyebutkan; kita berdiri di depan untuk memberi contoh, sejajar untuk bersama-sama berkarya dan belakang untuk mendorong setiap pihak maju demi kebaikan bersama. Tiga posisi itu dimulai dari memberi contoh. Berbicara mengenai contoh secara utuh, Gandhi mengatakan bahwa seseorang tidak bisa bertindak benar hanya dalam satu aspek kehidupan, sementara sibuk melakukan kesalahan dalam aspek-aspek lainnya. Kehidupan merupakan keutuhan yang tidak bisa dibagi-bagi. Sedangkan untuk berada sejajar



kita perlu mengenal kesalingan. Kearifan lokal kita mengenal hak puama, saling merangkul dari Maluku, torang basudara (kita bersaudara) dari Sulawesi, Silih asih silih asah silih asuh (Saling mengasihi, saling mengasah, saling mengasuh) dari Jawa Barat, dan masih banyak lainnya.

Peradaban membutuhkan sikap kesalingan untuk memanusiakan manusia. Sedangkan sikap berada di belakang, memberikan kesempatan lainnya maju untuk kepentingan bersama sangat membutuhkan bukan saja kerendahan hati tetapi juga melepas ego untuk kebaikan bersama. Mampukah kita, semoga dari gedung ini kerendahan hati untuk mendengarkan suara rakyat tanpa kecuali mempraktekkan kesalingan yang menekankan persaudaraan dan menyilakan lainnya maju untuk kepentingan bangsa bisa dicontohkan. Dan semoga kita semua bisa menjadi bagian dari contoh adab itu agar terjadilah apa yang diimpikan WR. Supratman dalam stanza kedua Indonesia Raya; Suburlah tanahnya suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya.

## TESTIMONI KEBANGSAAN

### Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Rukka Sombolinggi



Leluhur kita ini sudah memiliki peradaban yang tinggi sebelum agama dan konsep bangsa-bangsa masuk dari negeri asing. Setiap suku yang jumlahnya lebih dari seribu, memiliki sistem adatnya masing-masing yang mengatur dirinya dengan hukum dan pemerintahan adatnya. Leluhur kita juga sudah memiliki sistem religi, yang kita kenal dengan agama leluhur dan budaya yang berbeda satu sama lain. Leluhur kita, masyarakat adat nusantara yang beragam,

hidup damai saling menghormati keberadaan, hak adat masing-masing serta berinteraksi dengan bermartabat. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Itulah hidup yang beradab di nusantara, itulah peradaban nusantara. Peradaban nusantara itu memiliki gangguan terus menerus dengan masuknya sistem nilai baru secara bergelombang dari luar nusantara. Gelombang pertama masuk agama Hindu dan Budha dari dataran Benua Asia membawa konsep negara kerajaan. Gelombang kedua masuk agama Islam, dengan konsep negara kesultanan dari Timur Tengah. Yang terakhir, masuk kolonialisme Eropa bersama masuknya agama kristen dengan konsep negara baru sampai saat ini.

Sistem-sistem adat yang beragam yang menopang peradaban nusantara menjadi tamu di negeri sendiri, terpinggirkan dan menjadi target penaklukan untuk kepentingan asing yang berkuasa, Para pendiri bangsa menyadari betul masalah ini, dengan kesadaran itu mereka memposisikan masyarakat adat sebagai entitas istimewa yang keberadaan dan hak asal-usulnya wajib diakui dan dihormati oleh Negara Republik Indonesia. Amanat itu tertuang dengan jelas dan tegas, di Pasal 18 Ayat 2 UUD 1945, juga pasca amandemen menjadi Pasal

18b Ayat 2 dan Pasal 28i Ayat 3. Manusia yang beradab adalah yang baik kepada ibu bumi dan adil terhadap sesama manusia. Sebaliknya, Indonesia justru melahirkan berbagai undang-undang dan kebijakan yang mendukung pengrusakan bumi dan ketidakadilan terhadap sesama. Semua itu, demi kepentingan segelintir elit yang dibungkus dengan bahasa indah yaitu kepentingan publik dan pembangunan Indonesia.

Indonesia telah kita bentuk menjadi negara bangsa yang tidak beradab mengkhianati semangat pendirian bangsa Indonesia sebagai negara yang budiman. UU Omnibus Cipta Kerja atau Omnibus Cilaka adalah tindakan tidak beradab yang mempermudah korporasi mengeruk dan merusak rumah bersama kita, bumi nusantara. Saatnya kita kembali ke peradaban nusantara. Akui, hormati dan pulihkan hak-hak masyarakat adat dengan segera. Segera sahkan UU Masyarakat Adat, dan kita segera memulai pemulihan peradaban nusantara yang akan mengantarkan kita mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, bermartabat secara budaya.

# TESTIMONI KEBANGSAAN

## KETUA UMUM PPAD

Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri



**Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Ketua MPR, Para hadirin sekalian baik yang hadir langsung maupun secara daring.**

Ditinjau dari aspek geografi, tanah air memiliki tiga ciri utama yaitu sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, terletak pada posisi silang yang amat strategis dan kaya sumber daya alam. Mengelola negara kepulauan tentu jauh lebih sulit daripada negara kontinental terutama dalam hal menyatukan dan memakmurkan bangsa. Konsekuensi dari ciri letak strategis dan kaya sumber daya alam adalah beredarnya kepentingan asing yang dapat mendatangkan konflik serta ancaman. Secara demografis, bangsa ini selain penduduknya besar, nomor empat terbesar di dunia juga memiliki kebhinekaan luas multidimensi. Dalam ciri demografis ini tersimpan aneka kekayaan budaya bangsa sekaligus juga terkandung berbagai potensi konflik. Keliru mengelola kebhinekaan niscaya akan muncul konflik nyata. Sejarah kebangsaan kita, sejak sebelum proklamasi kemerdekaan kental diwarnai dengan persaingan bahkan pertarungan ideologi antara kelompok nasionalis, islam, liberalis dan komunis. Melihat karakteristik Keindonesiaan dan sejarah kebangsaan tersebut, maka dalam mengisi kemerdekaan terdapat dua pekerjaan rumah akbar sekaligus mutlak bagi bangsa Indonesia yaitu upaya integrasi internal untuk mewujudkan persatuan Indonesia dan upaya adaptasi eksternal untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itulah para *founding fathers*, telah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, sekaligus perekat bangsa. Serta juga, merancang UUD 1945 yang dijiwai oleh Pancasila. Sayangnya dalam Reformasi

1998, yang diikuti Amandemen UUD, telah terjadi penggantian UUD 1945 menjadi UUD 2002 yang secara fundamental telah mengubah roh persatuan kebersamaan, kekeluargaan sebagai hakikat dari Pancasila menjadi kebebasan sesuai dengan hakikat liberalisme individualisme.

Dihadapkan pada kebhinekaan masyarakat kita yang luas multidimensi, dan tingkat kedewasaan berdemokrasi yang belum baik, kebebasan tadi telah menjelma menjadi kebebasan luas yang nyaris tanpa batas. Kebebasan yang luas yang berkembang mendadak, secara derivatif telah melahirkan libido kekuasaan tinggi yang diikuti dengan politik uang, korupsi, dinasti, korporasi dan oligarki. Itu semua merupakan kanker ganas dari demokrasi. Disadari atau tidak, kebebasan yang nyaris tanpa batas justru telah menjauhkan bangsa yang tadi disampaikan, justru telah menjauhkan bangsa Indonesia dari upaya mewujudkan integrasi internal dan adaptasi eksternal. Sebaliknya, ini telah memunculkan berbagai macam konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berpotensi membawa bangsa Indonesia terjebak dalam perpecahan. Sebelum itu terjadi, saya mendesak para elit politik untuk melakukan kaji ulang UUD hasil amandemen tadi atau UUD 2002.

## EPILOG KONGRES KEBANGSAAN

Yudi Latif Ph.D



***Yang terhormat Bapak Ketua MPR Bambang Soesatyo, selebihnya puan-puan dan tuan-tuan yang budiman, Assalamu'alaikum wr.wb, salam sejahtera bahagia dan damai buat saudara sekalian.***

Merupakan usaha kesengajaan; gerak maju peradaban selalu usaha kesengajaan; Sumpah Pemuda dibangun atas kesengajaan; kita merdeka atas dasar usaha sadar secara

sengaja. Tidak ada gerak maju beradab tanpa kesengajaan dengan berencana dan bangsa ini tidak akan berjalan baik-baik saja dengan hanya tiban. Dari mana kita harus memulainya? Pertama dengan keyakinan. Pancasila dimulai dari keyakinan, maka dari itu Pancasila dimulai dengan ketuhanan, *'We are what we believe'*. Dengan itu membangkitkan *the law of attraction*. Kalau kita yakin, punya prasangka baik terhadap yang transenden, maka pintu-pintu berkah akan terbuka. Ketika kita mau merdeka tidak ada satu orang pun yang mempercayai Indonesia bisa merdeka. Ketika itu kita digencet oleh dua kekuatan besar, sekutu dan poros. Jangankan dihadapkan dua raksasa ini, sedangkan di bawah Belanda, satu noktah kecil di Eropa kita dijajah beratus-ratus tahun. Jadi, bagaimana mungkin kita merdeka? Tetapi para pendiri bangsa, sebagai cerminan dari pemahaman tentang ketuhanan bahwa sesuatu selalu ada yang tidak bisa hanya dibatasi dengan perhitungan di atas kertas, bahwa tuhan adalah sesuatu yang memungkinkan hal yang *impossible*. Bahkan kata Yesus Kristus, bahwa kalau kamu yakin bisa berjalan di atas air laut maka semesta membuat kamu bisa berjalan di atas laut. Betul, ternyata dengan keyakinan yang penuh itu Indonesia bisa merdeka.

Keyakinan tanpa *vision* ibarat suatu kebutaan. Para pendiri bangsa juga, dibalik keyakinan dan kepercayaan diri itu melengkapi dengan visi tentang bagaimana merdeka dan pasca merdeka. Visi itu kemudian nanti dirumuskan ketika membangun PPKI merencanakan tentang filosofi negara dan konstitusi negara. Mereka tahu persis jalan ke depan Indonesia disusun dengan *vision* seperti apa. Untuk mudahnya, kita sekarang berada di kompleks gedung perwakilan rakyat, kita mulai dari sini bagaimana cara berpikir pendiri bangsa. Kalau kita ingin menjalankan pemerintahan demokrasi sebagai jaring-jaring koordinasi, yang mempertemukan kekuatan nasional, kita lihat di dalam Pancasila, demokrasi pemerintahan ada di sila keempat. Sila keempat diapit oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan kelima; ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan, dan sebelah kanan adalah keadilan sosial. Ini cara berpikir seperti itu. Demokrasi yang dikehendaki, sebagai *enabler* yang memungkinkan untuk bergerak ke depan menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur pertama-tama memerlukan prasyarat rohaniah, mental dan kultural. Dimulai dari prasangka positif, dengan iman yang memancarkan energi positif bahwa energi buruk tidak akan membawa kebaikan. Hanya dengan *positive emotion* jalannya seluruh kekuatan nasional dapat digerakan bersama untuk tujuan yang lebih baik.

Sebagai pancaran dari iman itu kemudian masuk kita ke sila kedua. Sila kedua kuncinya dua, kalau kita ingin mengembangkan kemanusiaan, yaitu:

1. *Mutual care* (saling peduli terhadap sesama, tetangga, yang berbeda). Kalau Aceh mengalami tsunami, orang di Timur tidak sempat bertanya, 'Aceh itu agamanya apa, etnis nya apa?' tetapi kita *care* dan sumbang. Yang kita khawatirkan hari ini justru ketika satu golongan ditimpa musibah, bencana atau kesulitan, golongan lain mengatakan *sukurin lo*. Berarti *care* mulai pudar di antara kita. Kalau yang satu untung yang lain buntung, berarti nilai *care* mulai pudar.
2. *Liberty* (kebebasan). Ada dua jenis kebebasan yang harus kita kembangkan yaitu *negative liberty* (merdeka dari misalnya penindasan, penjajahan, diskriminasi, ketakutan, dll). Pada titik itu, order reformasi sudah banyak menghadirkan satu surplus *negative liberty*, yaitu kita bebas dari represi dan macam-macam lainnya. Kedua, *positive liberty* (bebas untuk misalnya untuk mengembangkan diri, mengembangkan kehidupan, kebangsaan

yang lebih baik, mencapai pencapaian luhur dari potensi kemanusiaan-kemanusiaan itu).

Kita lihat *negative liberty* Indonesia belum mengarah kepada *positive liberty* yang optimal. Dengan *care* dan *liberty*, terkoneksi, inklusi dan saling terhubung memiliki kesetaraan akses pada pendidikan, pengajaran, kesehatan, perbankan dan permodalan. Ada *mutual trust* diantara kita dengan konektivitas inklusif. Itulah sisi prasyarat mental kultural yang menjadi topangan bagi demokrasi. Sebelah kanan, setelah demokrasi dijalankan akan harus menjadi keadilan sosial. Karena kalau demokrasi mengarah kepada kesenjangan sosial atau ketidakadilan sosial lebih besar, seperti kata Soekarno dan Bung Hatta, 'Di dalam demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi, kebebasan tidak akan bertahan lama.' Tsunami sosial akan terjadi dan akan menikam demokrasi itu sendiri. Sekarang, studi-studi sosiologi politik dan sosial ekonomi menunjukkan bahwa di satu sisi kesenjangan sampai level tertentu itu ditolerir karena tanpa adanya derajat kesenjangan maka tidak ada intensif bagi meritokrasi. Hanya dengan adanya ruang kesenjangan maka akan ada insentif untuk pencapaian-pencapaian dan reward untuk meritokrasi. Oleh karena itu, dalam satu negara yang sama rasa sama rata, tidak ada insentif meritokrasi. *To some extent*, kesenjangan diperlukan untuk men-*drive achievement*. Ternyata, kesenjangan dibiarkan terlalu lebar, karena desain politik tadi yang tidak mem-*protect* ke arah lebih baik, bukan hanya akan mengancam si miskin tetapi juga berbahaya bagi yang kaya. Ini menimbulkan polarisasi sosial yang tajam, prasangka, saling tidak percaya, *mutual distrust* yang ujungnya bisa bukan saja yang miskin bermasalah, tetapi yang kaya adalah di *dragged down*.

Contoh terbaiknya adalah Amerika Serikat, negara yang dimulai sebagai imigran yang relatif *equal* penguasaan lahan setara, termasuk menjadi pelopor *universal education* dengan masuk universitas gratis pasca Perang Dunia II. Namun ketika kesenjangan terlalu lebar, sekolah elit dan universitas elit jatuh ke elit juga. Sekolah elit seperti Harvard didominasi oleh kalangan elit, kemudian kalangan elit menghadirkan kompleks-kompleks industri elit yang merekrut orang-orang dari sekolah universitas elit. Ini adalah yang disebut jebakan meritokrasi. Berbeda dengan aristokrasi lama, dimana sebagai *owner* kemudian merekrut *the best and brightest mind*, dari berbagai tempat termasuk *middle class* untuk bekerja di perusahaannya; bahkan selalu lebih baik memberikan peran proporsional



mana yang sebaiknya digarap oleh negara, komunitas atau dunia usaha.

Dunia usaha bukan lawan dari negara, tetapi dunia usaha adalah *partner* dalam usaha kemakmuran. Komunitas adalah pemasok nilai, karena dari sanalah rahim nilai itu. Oleh karena itu, dalam urusan tata nilai kita kembalikan pada rahim untuk memulai. Ada banyak komunitas seperti komunitas agama, sekolah, media, adat, minat dan bakat, kerja, ormas dan lain-lain. Itulah gembala nilai Pancasila yang sesungguhnya, karena kalau nilai dikerjakan secara sukarela atau *voluntary* maka orang akan melihat Pancasila adalah suatu hal yang diperlukan *in everyday life* bukan hanya kepentingan negara. Sebaliknya kalau Pancasila terlalu indoktrinatif atau *top down*, warga negara akan melihat itu sebagai sesuatu yang eksternal atau dipaksakan kepada dirinya. Sehingga, Pancasila tidak menjadi bagian pembatinan yang organisi di dalam diri. MPR, DPR dan birokrasi fokus pada perbaikan tata negara. Kalau MPR dan BPIP, mengembangkan sosialisasi Pancasila lebih baik harus bekerja sama dengan komunitas.

Tugas negara adalah untuk memperbaiki tata kelola negara seperti tata kelola pemilu, otonomi, riset dan lain-lain. Jangan sampai, setiap rezim berganti segalanya dimulai dari *scratch*, harus ada kontinuitas di dalam pembangunan. Tadi ada contoh Borobudur, pada abad ke-8 yang dibangun dalam waktu 75 - 100 tahun tanpa perencanaan jangka panjang yang berkelanjutan melampaui tiga rezim maka kita tidak akan melihat peradaban luhur seperti itu. Oleh karena itu, tata kelola menjadi fokus perhatian daripada para penyelenggara negara. Usaha kemakmuran kasih tanggung jawabnya kepada dunia usaha. Tidak ada negara makmur kalau dunia usahanya tidak berkembang maju. Agen utama dalam kemakmuran adalah dunia usaha, baik BUMN, swasta maupun koperasi sifatnya harus *partnership*, gotong royong dan tolong menolong. Oleh karena itu, itulah cara bekerjanya gotong royong, masing-masing elemen punya peran fungsinya masing-masing tetapi secara keseluruhan disatukan oleh visi bersama membentuk negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Itu dia kira-kira apa yang menjadi *concern* jalan baru kebangkitan Indonesia di masa mendatang ●



## **IKRAR**

### **KEBANGKITAN KEBANGSAAN**

Kami putera dan puteri Indonesia, bersyukur atas karunia kemerdekaan, dasar negara Pancasila serta segala potensi keragaman manusia. Keragaman hayati, keragaman budaya, keragaman spiritual dan keragaman sumber daya yang kami yakini sebagai modal kemajuan dan kebahagiaan bangsa yang harus diolah dengan penuh percaya diri, berkemandirian, berkeperibadian, berkelanjutan, bermental kreatif dan berintegritas.

Kami putera dan puteri Indonesia, berdiri sebagai anak-anak negeri bahari yang berani mengarungi tantangan gelombang perkembangan global dan terlibat dalam pergaulan dunia dengan sikap terbuka terhadap unsur-unsur positif dari luar yang dapat memperkaya mutu kemanusiaan dan kemampuan bangsa untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan peradaban, kedaulatan dan kemakmuran seluruh rakyat.

Kami putera dan puteri Indonesia, berkeyakinan pentingnya penataan sistem pengelolaan negara secara terencana, terpadu dan berkelanjutan, yang lebih mampu memenuhi pembangunan rohani dan jasmani, mengolah potensi dan realitas bangsa serta sanggup menghadapi tantangan global dalam semangat gotong royong yang melibatkan partisipasi segenap komponen bangsa dengan pembagian peran yang tepat antar negara, komunitas dan dunia usaha.

**Jakarta, 28 Oktober 2021**



# HASIL RUMUSAN KONGRES KEBANGSAAN

“Ikhtiar Memperadabkan Bangsa”

Jakarta, 28 Oktober 2021

## Pendahuluan

Kongres Kebangsaan dilaksanakan bersamaan dengan hari peringatan Sumpah Pemuda. Momentum ini dipilih secara sengaja sebab Sumpah Pemuda merupakan tonggak sejarah dalam proses tumbuhkembangnya bangsa Indonesia. Kendati sebagai kesatuan identitas Indonesia baru lahir pada waktu itu, namun peradaban Indonesia sudah berakar pada elemen-elemen sosial budaya di Nusantara, puluhan ribu tahun silam. Sebagaimana dikutip oleh Ketua Steering Committee, Mayjen TNI (Purn) I Dewa Putu Rai, dari Clifford Geertz dalam buku berjudul “Old Societies dan New States”, Indonesia adalah old wine in new bottle atau anggur tua dalam botol baru. Gugusan masyarakat lama dalam negara baru. Di masa lalu, bangsa ini diakui pernah memiliki peradaban tinggi dengan penguasaan teknologi yang tinggi pula pada zamannya. Tanpa penguasaan teknologi yang tinggi rasanya mustahil anak-anak bangsa pada zaman Kerajaan Syailendra mampu membangun Candi Borobudur yang memiliki 2.672 panel relief dan 504 arca Buddha.

Harus diakui peradaban bangsa Indonesia pernah juga mengalami keterpurukan akibat penjajahan ratusan tahun lebih, sehingga mengalami apa yang disebut hegemoni peradaban kolonialisme. Hingga kini, negara-bangsa Indonesia masih dalam proses untuk bangkit membangun kembali peradaban Pancasila. Dalam konteks itu, untuk menggalang pemikiran dan gagasan untuk membangun kembali peradaban Indonesia, maka sejak 20 Maret 2019, Aliansi Kebangsaan bersama Forum Rektor Indonesia, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Yayasan Suluh Nusantara Bakti, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, serta media telah menyelenggarakan diskusi serial selama kurang lebih tiga tahun, dengan tema “Kebangsaan yang Berperadaban Membangun Indonesia dengan Paradigma Pancasila”. Diskusi serial tersebut dilaksanakan atas keterpanggilan dan kesadaran para cendekiawan Indonesia akan perlunya terobosan dan pendekatan baru dalam menjawab tantangan pembangunan bangsa atau pembangunan negara, untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan Makmur.

Melalui pertukaran pikiran dan gagasan selama pelaksanaan diskusi serial tersebut, tambahnya, telah dikembangkan suatu pendekatan budaya peradaban berdasarkan paradigma Pancasila sebagai perangkat operasional pembangunan nasional dalam tiga ranah kehidupan bangsa yaitu, ranah mental kultural (tata nilai), ranah institutional-politikal (tata kelola), dan ranah material-teknologikal (tata sejahtera). Pendekatan tiga ranah peradaban dengan paradigma Pancasila ini diyakini dapat digunakan sebagai tolok ukur paradigmatis dalam menguji dan mengembangkan sistem ketahanan nasional dan pembangunan nasional kita. Kongres Kebangsaan merupakan kulminasi dari proses-proses ‘rembuk intelektual’ sebelumnya dan ikhtiar untuk menawarkan peta jalan bagi kebangkitan nasional kedua.

Kongres Kebangsaan 2021 mendapatkan dukungan cukup luas dari kaum cendekiawan berbagai lintas profesi dan institusi, golongan pengusaha dan masyarakat politik, serta berbagai komponen masyarakat yang merasa terpenggil menjadikan krisis pandemi Covid-19 yang sedang kita hadapi sebagai titik balik kebangkitan bangsa, sebagaimana komitmen dan janji kebangsaan yang diikrarkan oleh pemuda pemudi Indonesia, pada kongres pemuda kedua, pada 28 Oktober 1928. Komitmen dan janji kebangsaan yang menyatukan semua perbedaan dalam satu identitas Bangsa, Tanah Air dan Bahasa Indonesia tersebut, tentu merupakan modal sosial yang sangat berharga bagi Bangsa Indonesia yang harus dirawat dan dikuatkan kembali untuk kemajuan bangsa dan negara ke depan.

Presiden Joko Widodo dalam sambutan pada Kongres Kebangsaan memberikan tekanan khusus tentang persatuan Indonesia sebagai negara-bangsa. Dalam pandangan Presiden, satu dan persatuan merupakan kata kunci dalam berbangsa dan bernegara. Walaupun ada lebih dari 270 juta penduduk, semua penduduk tetap satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa persatuan. Ada individu dengan segala kebebasannya tetapi ada kepentingan bersama dengan segala konsensus dan konsekuensinya. Komitmen terhadap kebebasan individu dijamin oleh konstitusi, tetapi menjadi Indonesia Incorporated, bangsa yang bersatu kekuatannya merupakan syarat utama untuk memenangkan persaingan global.

Presiden berharap, Kongres Kebangsaan akan melakukan refleksi mendalam tentang dunia kini dan yang akan datang, serta menghasilkan pemikiran dan rekomendasi besar bagi penguatan kebangsaan kita. Tetapi, yang lebih penting lagi adalah langkah-langkah perbaikan, apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kehidupan kebangsaan kita ke depan.

## **Kebangsaan Indonesia sebagai Puncak Perkembangan Kebudayaan<sup>1</sup>**

Kongres Kebangsaan menawarkan peta jalan pembangunan sebagai masukan rekomendasi kebijakan bagi penyusunan sistem perencanaan pembangunan nasional serta menjadi ruang konsensus bersama berbagai entitas dalam pergumulan Indonesia yang bhineka dalam upaya membangun peradaban Pancasila. Pancasila adalah soal perjuangan, soal keyakinan, dan pendirian asasi. Pancasila akan tertanam dalam jiwa bangsa, jika bangsa ini memperjuangkannya. Usaha penanaman Pancasila harus dilakukan terus menerus tanpa henti.

Dalam perspektif Pancasila, peradaban Indonesia sebagai puncak perkembangan kebudayaan nasional merupakan kerangka operasional dalam pembangunan tiga ranah kehidupan bangsa sekaligus, yaitu:

1. Ranah mental spiritual (tata nilai) yang menegaskan pentingnya penguatan visi spiritual peradaban dan menjaga terpeliharanya etos, etik dan mindset sebagai jiwa budaya peradaban.
2. Ranah institutional political (tata kelola) yang mengamanatkan pentingnya pengelolaan manajerial pemerintahan dan ketepatan desain kelembagaan institusi negara agar tidak terjadi salah urus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Ranah material teknologikal (tata sejahtera) yang menempatkan keadilan material dan kesejahteraan umum sebagai landasan fundamental dalam membangun ketahanan dan kebajikan sosial.

Kebangsaan Indonesia dengan peradaban Pancasila dan upaya memperadabkannya kini harus dilandasi oleh kesadaran bahwa tidak ada satupun peradaban di dunia ini sekuat dan sehebat apapun kelihatannya akan kebal dalam potensi kerentanan yang dipicu oleh beragam faktor, antara lain 1) ketidaksetaraan dan oligarki politik yang melemahkan kohesi sosial dan mendorong terjadinya disintegrasi bangsa, 2) degradasi ekologi dimana kemampuan sumber daya lingkungan semakin rapuh dalam menopang kebutuhan masyarakat yang tumbuh dalam lompatan deret ukur, 3) kompleksitas tantangan dan persoalan dalam kehidupan kebangsaan, dan 4) faktor eksternal yang tidak terprediksi seperti perang, wabah, bencana alam dan lain-lain.

Sejarah peradaban menunjukkan bahwa peradaban bersifat dinamis. Keruntuhan Uni Soviet, pergeseran pemimpin peradaban dunia dari Inggris ke

---

<sup>1</sup> Disarikan dari sambutan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, SE., MBA.

Amerika Serikat, Amerika Serikat yang memiliki tanggungan hutang sebesar 400 ribu triliun yang mengancam terjadinya government shutdown dan potensi gagal bayar hingga krisis finansial, cukuplah sebagai pelajaran bahwa jatuh bangun dan dinamika peradaban adalah suatu keniscayaan dan selalu menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh setiap negara.

Dalam konteks itu, dibutuhkan peletakan dasar fundamental dari urgensi membangun peradaban dalam paradigma Pancasila. Ketika para pendiri negara Indonesia menyiapkan berdirinya Negara Indonesia Merdeka, mereka sadar untuk menjawab suatu pertanyaan fundamental: “Di atas dasar apakah negara Indonesia merdeka didirikan?” Para pendiri negara-bangsa merumuskan tata nilai yang mendukung tata kehidupan sosial dan tata kerohanian bangsa yang memberi corak, watak, dan ciri masyarakat dan bangsa Indonesia yang membedakan dengan masyarakat atau bangsa lain. Pancasila lah rumusan nilai-nilai itu.

Fakta historis demikian merupakan suatu kenyataan objektif yang merupakan jati diri bangsa Indonesia. Maka kini, berangkat dari kenyataan demikian, perlu ada pemikiran dan kekuatan alternatif untuk mengingatkan dan menunjukkan peta jalan pembangunan yang dapat diandalkan, jalan pembangunan yang lebih menjamin ketahanan nasional dengan kesanggupan untuk merealisasikan visi dan misi negara, berdasarkan Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Visi negara tertuang pada Alinea Kedua dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu ‘Terwujudnya perikehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.’ Sedangkan misi negara tertuang dalam Alinea Keempat, yaitu ‘Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.’

Cita-cita mewujudkan visi dan misi negara yang bersifat prinsipil tersebut, tentunya harus diterjemahkan dalam rujukan sebuah haluan negara. Jangan biarkan bangsa ini berjalan tanpa haluan yang idealnya menjadi wewenang seluruh rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara dan direpresentasikan melalui lembaga perwakilan sebagaimana sila ke-empat. Dalam konsepsi ini, MPR adalah lembaga perwakilan yang dianggap terlengkap, yang mewakili representasi rakyat (DPR) dan representasi teritorial (DPD). Walaupun masih ada kurang satu yaitu utusan golongan yang mewakili kelompok-kelompok minoritas, termarjinalkan sebagaimana pendiri bangsa ini memikirkannya ketika mendirikan negara Republik Indonesia.

Dalam kerangka itu, pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)

hendaknya tidak didasarkan pada sikap politik setuju atau tidak setuju yang kemudian dicari berbagai alasan afirmatif untuk mendukung sikap tersebut. Kerangka pikir yang digunakan mestinya melampaui sikap politik partisan, bahwa negara Indonesia dalam mencapai tujuan berbangsa dan negara bukan hanya fragmentaris, melainkan secara terencana dengan matang dan terintegrasi dengan wilayah-wilayah lain di berbagai wilayah di Indonesia.

Upaya mewujudkan tujuan pemerintahan negara tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik tanpa perencanaan yang matang dan berkesinambungan, dengan strategi kebijakan serta arah yang koheren dengan kaidah pokok negara yang fundamental atau *staat fundamentalnorm*. PPHN dalam konteks saat ini tidak hanya penting namun mendesak dan harus dilakukan untuk mewujudkan pembangunan nasional yang selaras dan konsisten dengan paradigma Pancasila, serta berkesinambungan dan berkelanjutan secara lintas periode pemerintahan. PPHN mengarahkan pengelolaan pembangunan nasional, mewujudkan cita-cita nasional yaitu membangun negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Di samping itu, perlu diingat bahwa proses perumusan Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia merupakan traktat kebudayaan yang memandu kita menghampiri peradaban masa depan. Oleh karena itu, Pancasila harus dijadikan sebagai tolok ukur paradigmatis untuk mengembangkan dan menguji sistem pembangunan dan ketahanan nasional Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila sebagai gatra ideologi tidak ditempatkan sejajar dengan gatra politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan hankam melainkan berdiri di atas atau mengatasi gatra-gatra lainnya. Taraf pembangunan dan ketahanan nasional di berbagai gatra tersebut bisa diukur berdasarkan imperatif Pancasila dalam ranah mental karakter, institusional politikal serta material teknologikal. Dengan demikian, Pancasila menjadi landasan ideologi kerja yang dapat memberikan framework atau panduan dan haluan yang memudahkan perumusan pembangunan, penancangan program serta pilihan kebijakan dalam rangka memperkuat ketahanan nasional dalam mewujudkan cita-cita bangsa.

Ikhtiar Memperadabkan Bangsa dengan Paradigma Pancasila<sup>2</sup>

Sejarah kemanusiaan universal memberi pelajaran berharga bahwa krisis dan katastrofi senantiasa berwajah ganda. Di balik kegelapan dan penderitaan yang ditimbulkan, krisis juga bisa menunjukkan cahaya, kesejatan dan kekuatan

---

<sup>2</sup> Disarikan terutama dari Orasi Kebangsaan dari Ketua Aliansi Kebangsaan, Pontjo Sutowo, serta sambutan Ketua Forum Rektor Indonesia, Prof. Dr. Panut Mulyono, Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Dr Alfitra Salamm, APU., dan Wakil Ketua HIPMI, Akbar Himawan Buchari, S.H.

umat manusia. Kata “krisis” sendiri berasal dari bahasa Yunani, “krisis” (kata benda) atau “krino” (kata kerja), yang berarti “menarik batas” atau “titik balik”. Dalam momen gelap bahaya katastrofi, selalu ada cerah peluang untuk menarik garis batas antara kejahiliah dan keberadaban; sebagai titik balik untuk menyehatkan dan memajukan kehidupan.

Perspektif demikian dapat kita gunakan untuk memaknai Sumpah Pemuda, 93 tahun yang lalu,. Pada 28 Oktober 1928, sekumpulan pemuda-pelajar dari berbagai latar etnis, agama, dan kepulauan berikrar di Jakarta, untuk mempertautkan keragaman menjadi kesatuan kekuatan dengan mengaku: “Bertumpah darah satu, tanah air Indonesia; berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia”. Sumpah ini pun harus kita lihat sebagai monumen dari rangkaian respon kaum inteligensia sadar politik terhadap krisis sosial-ekonomi-politik di Hindia Belanda pada masa itu.

Berakhirnya Perang Dunia I, suasana kehidupan di Tanah Air memasuki masa krisis dan katastrofi yang akut, ditandai oleh memburuknya kehidupan perekonomian akibat disrupsi perang, krisis industrial dan gagal panen, bersamaan dengan cengkraman pandemik influenza (flu Spanyol), yang mulai merebak sekitar akhir Perang Dunia I (1918) hingga awal 1920-an, yang memakan korban kematian hingga 4,6 juta jiwa. Suasana katastrofi tersebut membangkitkan semangat perjuangan emansipasi di kalangan kaum terpelajar Bumi Putera, baik yang mengenyam pendidikan di Tanah Air maupun di luar negeri.

Meningkatnya kesadaran politik emansipatif di kalangan kaum terpelajar itu, bagi pemerintahan kolonial Belanda dilihat sebagai penambah beban kesulitan ekonomi, yang harus ditumpas dengan rezim keamanan yang lebih represif. Aksi-reaksi dari dinamika itulah yang memperkuat solidaritas kaum terjajah yang membangkitkan semangat persatuan kebangsaan yang pada gilirannya membuka jalan bagi kemerdekaan Indonesia.

Dalam Kongres Pemuda yang menelurkan Sumpah Pemuda, para pemuda pendahulu kita yang masih berada di bawah penjajahan bersepakat bahwa untuk memajukan bangsa kita harus merdeka. Untuk dapat merdeka, kita harus bersatu. Pendidikan menjadi cara utama untuk membangun pengetahuan dan wawasan kebangsaan sebagai bekal menuju kemerdekaan.

Bila kaum terdidik-terpelajar sebagai minoritas kreatif pada masa kolonial, melalui Sumpah Pemuda 1928, mampu bangkit merespons tantangan zaman, lantas apa respons kaum terpelajar dan penggiat ekonomi-politik saat ini terhadap krisis kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang muncul bersamaan dengan pandemi covid-19? Hari ini berkongres untuk menjadikan pandemi-19 sebagai



batu uji untuk menakar kekuatan dan kelemahan kita sebagai bangsa, seraya mencari jalan keluar untuk memajukan peradaban bangsa: seberapa kuat ketahanan nasional kita, seberapa tinggi mutu peradaban kita, seberapa dalam pembudayaan nilai Pancasila kita.

Dalam usaha menakar kesejatan dan pencapaian pembangunan itu, harus kita pahami dulu hakikat pembangunan Indonesia sebagai pengemban moral lagu kebangsaan Indonesia Raya: “bangunlah jiwa, bangunlah badannya”. Alhasil, yang dipedulikan dalam pembangunan bukan hanya pertumbuhan material, tetapi juga perkembangan kejiwaan. Bukan hanya infrastruktur “keras” (sarana fisik), tapi juga infrastruktur “lunak” (keadaban, pendidikan, Kesehatan).

Selain itu, dalam aktivitas pembangunan harus juga dipastikan bahwa yang semarak berkembang di sini bukan sekadar “pembangunan di Indonesia”, yang pelakunya bisa saja bukan orang Indonesia atau tidak berjiwa Indonesia, dengan hasil pembangunan yang dapat menyingkirkan dan mengasingkan bangsa sendiri. Yang harus lebih giat kita kembangkan adalah “pembangunan Indonesia”. Pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat Indonesia melalui pengolahan dan peningkatan nilai tambah sumber daya Indonesia dengan sepenuh jiwa raga Indonesia, dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional: menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, berlandaskan Pancasila.

Adapun kualitas hidup dan peradaban ditinggikan melalui pemajuan kapabilitas dalam “tata nilai” (mental-kultural), “tata Kelola” (institusional-politikal), dan “tata sejahtera” (material-teknologikal). Tata nilai membangun kekuatan jiwa budaya kewargaan yang inklusif. Tata sejahtera membangun kemakmuran material yang inklusif. Tata Kelola menjadi enabler, yang mendukung pembangunan rohani dan jasmani, melalui praksis politik yang inklusif.

Pandemi Covid-19 membantu kita mengenali kekuatan dan kelemahan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila dalam ketiga ranah tersebut. Pada ranah mental-kultural, sisi positif terpancar dari semangat gotong royong yang relatif masih bertahan di tengah masyarakat, sedangkan sisi negatif terlihat dari dekadensi etis dalam dunia politik, dalam bentuk polarisasi politik yang terus berkobar di tengah wabah, serta tindak-tanduk segelintir elite yang kurang terpuji dan kurang memiliki empati terhadap suasana kebatinan rakyat yang sedang dirundung malang. Ringkasnya, sabuk pengaman ketahanan nasional kita bersumber dari kemampuan kita merawat nilai-nilai Pancasila di jantung masyarakat. Sedangkan titik kerawanan nasional kita ditimbulkan oleh tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam dunia politik.

Dalam tata Kelola kelembagaan politik, pandemi mengungkap sebagian retakan dan ketidakefektifan dalam sistem pemerintahan kita. Perselisihan mengemuka dalam relasi antar tingkat pemerintahan serta praktik tata kelola

yang bersifat sporadis tanpa mekanisme sistemik. Perubahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi tak membuat postur dan cakupan negara makin ramping, malah makin gemuk. Pergeseran dari negara otoriter-sentralistik ke negara demokrasi-desentralistik dengan euforia kebebasan individu yang dihadirkan Orde Reformasi juga tak disertai pemenuhan prasyarat fundamental yang menyertai proses desentralisasi dan liberalisasi, yaitu rule of law, meritokrasi dan akuntabilitas.

Diperlukan ikhtiar untuk mencari yang terbaik bagi republik yang kita cintai, agar tata kelola dalam bernegara selain demokratis, juga bisa menghadirkan sistem politik yang baik dengan lahirnya para pemimpin yang dikehendaki rakyat. Sejarah mengajarkan, sistem politik yang buruk dan lemah serta tidak berkeadaban akan melahirkan aktor-aktor politik yang bad persons in a good system. Sistem politik yang dipilih harus disertai dengan kekokohan nilai-nilai keadaban dan komitmen terhadap etika bagi aktor-aktor politik bernegara.

Tidak ada sistem politik yang sempurna. Ada dua patokan untuk tata kelola yang baik di tengah ketidaksempurnaan sistem politik yang dipilih. Pertama, gerak progres itu memerlukan dukungan stabilitas. Untuk itu, perubahan yang dilakukan jangan sampai merobohkan semua tiang tradisi. Kita bisa belajar dari pengalaman gerak perubahan di negara-negara demokrasi mapan seperti Amerika Serikat, yang memperlihatkan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi tidak sampai merombak struktur dasar konstitusi, dan untuk itu perubahan konstitusi ditempuh dengan acara addendum.

Kedua, gerak progres juga memerlukan usaha penyesuaian secara terus-menerus seiring dengan perkembangan zaman. Tata kelola negara yang baik harus bisa memberi keseimbangan antara peran negara, peran pasar, dan komunitas. Memimpin pemerintahan, apalagi dalam sistem demokrasi, tak harus dengan cara “mendayung” (rowing), yang memerlukan otot aparaturnegara yang besar; cukup secara “mengemudi” (steering) dengan mengaktifkan segala peran, fungsi dan agensi secara partisipatif dan koordinatif.

Dalam tata sejahtera, pandemi mengungkapkan kelemahan negara kita setidaknya dalam dua hal. Pertama, kesenjangan yang makin lebar karena pengabaian prinsip keadilan dalam distribusi harta, kesempatan dan privilese sosial. Kedua, Indonesia dengan potensi sumber daya alam yang melimpah justru tak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan dan obat-obatan secara berdaulat. Dampaknya, pandemi melahirkan porak poranda ekonomi yang tak terelakkan. Jaminan hidup dan kepastian yang dibutuhkan semua sulit diwujudkan.

Dengan gambaran seperti itu, krisis pandemi bisa menjadi titik balik dalam mengupayakan pembangunan kualitas hidup dan peradaban sebagai pengamalan

Pancasila. Keampuhan Pancasila sebagai ideologi menuntutnya menjadi “ideologi kerja” (working ideology) dalam praksis pembangunan. Dengan kata lain, ideologi Pancasila itu menjadi kerangka paradigmatis dalam pembangunan nasional, yang dibudayakan dalam tiga ranah peradaban: ranah nilai budaya (mental-spiritual-karakter) dalam kerangka “tata nilai”, ranah kelembagaan sosial-politik dalam kerangka “tata kelola”, ranah material-teknologikal dalam kerangka “tata sejahtera.”

Bersamaan dengan itu, pendekatan dalam mengupayakan pembudayaan Pancasila yang tercermin dalam semangat gotong royong. Dengan kata lain, pendekatannya tidak boleh lagi dikembangkan secara vertikal dengan dimonopoli oleh negara; tetapi harus dikembangkan secara horizontal, dengan melibatkan peran komunitas dan dunia usaha.

Pembudayaan tata-nilai diarahkan untuk mengembangkan kepribadian nasional dan budaya kewargaan yang inklusif. Sebagai nilai inti moral publik, Pancasila bukanlah sebatas bahan hafalan, melainkan nilai hidup yang harus dialami dan dijalani penuh integritas, dengan menjaga konsistensi antara pikiran, perkataan, sikap dan perbuatan; antara keyakinan, pengetahuan, kebijakan dan tindakan.

Karena pembangunan nilai ini harus dibudayakan sejak dini, bahkan sejak buaian, di berbagai ruang (privat, komunitas, dan publik), dijaga sepanjang siang dan malam, dan secara berkelanjutan, maka ada keterbatasan negara sebagai agen pembudayaan nilai. Oleh karena itu, agen sosial yang paling berkompeten untuk mengemban urusan tata nilai adalah komunitas pendidikan. Nilai Pancasila yang semula digali dari nilai-nilai hidup yang tumbuh di berbagai komunitas Tanah Air, sudah sepatutnya dikembalikan ke perawat utamanya, antara lain komunitas sekolah, komunitas agama, komunitas pemukiman, komunitas kerja, komunitas media, komunitas minat-bakat, komunitas orpol dan ormas, serta komunitas adat.

Lembaga-lembaga negara (kecuali lembaga-lembaga di bidang pendidikan), ketimbang sibuk mengurus sosialisasi Pancasila kepada masyarakat sebagai pemborosan sumber daya yang tidak efektif, lebih baik mengurus pembudayaan nilai di lingkungan komunitas kerjanya sendiri; yakni bagi penyelenggara negara dan jaringan kader kepemimpinan politik. Alhasil, sebelumnya mempancasilakan masyarakat, penyelenggara negara harus terlebih dahulu mempancasilakan dirinya sendiri.

Adapun lembaga-lembaga negara dengan tugas pembinaan nilai Pancasila, dalam menjalankan tugasnya harus bekerja sama dengan komunitas sesuai dengan kelompok sasaran. Tugas paling penting yang bisa dikerjakan lembaga-lembaga negara tersebut adalah sejalan dengan fungsi negara untuk (menghormati,

melindungi, memfasilitasi, dan memenuhi) peran-peran individu dan komunitas dengan membuat pedoman dasar, kerangka regulasi, kode perilaku, fasilitasi, pengukuran dan monitoring, agar pembudayaan nilai yang dilakukan berbagai komunitas tadi memiliki irisan persamaan, koherensi dan jaminan mutu, sehingga secara serempak bisa memenuhi sasaran dan tujuan yang dikehendaki.

Pembudayaan tata-kelola diarahkan untuk mengembangkan kehidupan politik yang inklusif dengan mewujudkan negara hukum dengan sistematis “kekeluargaan” (gotong royong), yang mengintegrasikan kekuatan nasional melalui mekanisme demokrasi yang bercita kerakyatan, bercita permusyawaratan dan bercita hikmat-kebijaksanaan dalam suatu rancang bangun institusi-institusi demokrasi yang dapat memperkuat persatuan negara persatuan dan keadilan sosial negara kesejahteraan.

Agen utama dalam urusan tata kelola ini adalah para penyelenggara negara dan kepemimpinan politik. Adapun prioritas rezim politik-kebijakan tersebut adalah menata ulang sistem demokrasi dan pemerintahan dalam kerangka memperkuat persatuan nasional dan keadilan sosial. Untuk itu, berbagai desain institusi demokrasi dan pemerintahan harus ditinjau ulang. Praktik politik tidak dibiarkan sekadar perjuangan kuasa demi kuasa, namun harus mengemban substansi politik dalam rangka menghadirkan berbagai kebijakan yang andal demi memenuhi visi dan misi negara. Kebijakan politik harus merespons tantangan perbaikan tata kelola mental-kultural (tata nilai), tata kelola sumber daya material (tata sejahtera), serta tata kelola demokrasi dan pemerintahan.

Pembangunan tata-sejahtera diarahkan untuk mengembangkan kemakmuran yang inklusif, dengan mengupayakan perekonomian merdeka; berlandaskan usaha tolong-menolong (semangat kooperatif), disertai penguasaan negara atas “karunia kekayaan bersama” serta atas cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak; seraya memberi nilai tambah atas karunia yang terberikan dengan input pengetahuan dan teknologi. Pemangku utama dalam urusan tata sejahtera ini adalah dunia usaha dan rezim perekonomian, dengan prioritas utamanya mengembangkan perekonomian berbasis semangat tolong-menolong (kooperatif). Dengan semangat itu, politik anggaran harus lebih berorientasi pada kesejahteraan umum. Kemampuan negara untuk menguasai dan mengelola kekayaan bersama serta cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus disehatkan. Mata rantai produksi dari hulu ke hilir jangan sampai terkonsentrasi di satu tangan. Kemakmuran dan pemerataan ekonomi bisa didorong melalui pengembangan kewirausahaan yang dibekali penguasaan inovasi-teknologi, dengan memprioritaskan pengembangan teknologi berbasis potensi dan karakteristik keindonesiaan. Untuk

itu, aktivitas riset dan inovasi sebaiknya tidak hanya mengandalkan push factor dari lembaga riset negara dan perguruan tinggi, melainkan juga harus menjadi bagian integral dari dunia usaha.

Demikianlah pokok-pokok pikiran paradigma Pancasila untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperadabkan bangsa. Setelah lebih dari tujuh dekade Pancasila ditahbiskan sebagai dasar (filsafat) negara, pandangan dunia, norma dasar, ideologi negara, dan kepribadian bangsa Indonesia, masih terdapat jurang yang lebar antara idealitas Pancasila dengan realitas kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.

### **Refleksi Kebangsaan Lintas Bidang**

Tantangan kebangsaan Indonesia hari ini terbentang di berbagai bidang. Kongres Kebangsaan tahun 2021 merupakan momentum untuk urun rembuk tokoh-tokoh dari aneka latar belakang, dari pertahanan-keamanan hingga pendidikan, dari kelompok profesional, fungsional, hingga masyarakat adat, dalam rangka merefleksikan tantangan kebangsaan Indonesia.

Di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat<sup>3</sup>, kerja rekat bangsa Indonesia telah menjadi modal untuk melalui masa kritis pandemi Covid-19, melalui pemeliharaan kondusivitas dan merajut sinergi dan kebersamaan. Namun demikian, upaya memperkuat kebinekaan Indonesia berdasarkan Pancasila masih mendapatkan tantangan dengan masih maraknya gerakan radikalisme dan intoleransi yang dapat merusak kohesi sosial dalam keberagaman bangsa Indonesia.

Di bidang keagamaan<sup>4</sup>, kebangsaan Indonesia merupakan pesan keagamaan yang sangat mendalam, terutama bagi umat Islam, untuk berkontribusi bagi bangsa kita. Oleh karena itu NU mengikrarkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Dasar Negara Pancasila adalah final, artinya kita akan menolak siapa saja kelompok mana saja yang mempertanyakan atau mengganggu dua konsensus kebangsaan kita.

Dalam perspektif agama, mencintai adalah memakmurkan. Oleh karena bangsa harus terus berkomitmen dengan spirit nilai-nilai luhur bangsa kita, nilai-nilai spirit keagamaan untuk memajukan, membangun bangsa kita kepada cita-cita yang telah ditetapkan sejak kemerdekaan. sebagaimana dalam kalam hikmah Hublulwaton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Oleh karena

---

<sup>3</sup> Disarikan dari pesan kebangsaan yang disampaikan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, melalui Wakabag Intelkam Irjen Pol Suntana

<sup>4</sup> Disarikan dari pesan kebangsaan oleh Imdadun Rahmat mewakili PBNU dan Ma'mun Murod mewakili PP Muhammadiyah

itu, tokoh-tokoh agama Islam mengidealkan Indonesia sebagai *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*, yang ditandai dengan beberapa parameter: 1) memiliki komitmen untuk menghormati hak hidup, 2) komitmen untuk menjaga agama, hak berkeyakinan, dan hak mengamalkan agama, 3) kewajiban negara untuk memakmurkan warganya. Berkenaan dengan itu membangun peradaban negara merupakan sebuah keniscayaan, sebab kehancuran negara diakibatkan oleh ketidakberadaban negara yang ditandai dengan tiga ciri: 1) mengabaikan Tuhan, 2) buruk dalam tata kelola, dan 3) abai terhadap kesejahteraan.

Dalam bidang pendidikan,<sup>5</sup> tantangan kebangsaan kita antara lain bagaimana mewujudkan generasi milenial sebagai insan berkarakter kuat sesuai dengan ideologi kebangsaan kita, Pancasila, terutama dalam penguatan dimensi transendental, dimensi humanisme, cinta persatuan, bijak dalam keputusan dan berbasis musyawarah dan mufakat, dan mampu menjadi pemimpin-pemimpin yang unggul menghadirkan keadilan yang riil bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, tantangan di pendidikan adalah bagaimana menjadikan Pancasila sebagai jiwa zaman (*zeitgeist*). Secara real dan virtual, Pancasila harus mewarnai semua cyber dan situs-situs agar generasi bangsa cinta akan kesatuan, bangga akan dan toleran akan keberagaman. Dalam kerangka pendidikan, nilai-nilai Pancasila harus dikelola secara tepat untuk mencapai tatanan kehidupan kebangsaan yang aman dan nyaman secara bersama. Proses realisasi Pancasila harus melibatkan semua pihak. Dengan mengambil peran masing, seluruh anak bangsa bisa menerapkan ajaran Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sung Tulada, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani. Di depan untuk memberikan contoh, di tengah untuk berkarya bersama, dan di belakang untuk menjadi pendorong untuk maju secara bersama, demi kebaikan bersama.

Dalam bidang kebudayaan<sup>6</sup>, solidaritas bangsa merupakan tantangan kebangsaan Indonesia. Sebelum pandemi Covid-19 keadilan sosial bagi seluruh rakyat masih jauh dari yang diidamkan. Sebagian kita shopping ke Hongkong dan Los Angeles, sedangkan 50% bangsa belum juga aman sejahtera, 10% bahkan masih terjerumus ke dalam kemiskinan absolut. Di tengah pandemi, buruknya solidaritas sosial dibuktikan dengan adanya korupsi, sebagian kita tidak malu memperkaya diri dengan mencuri dari bantuan sedikit yang disediakan bagi mereka yang membutuhkan.

---

<sup>5</sup> Disarikan dari pesan kebangsaan Rektor Universitas Hasanuddin, Prof Dr Dwia Aria T Pulubuhu dan Ketua Yayasan Cahaya Guru, Henny Supolo

<sup>6</sup> Disarikan dari pesan kebangsaan Romo Prof Dr Frans Magnis Suseno dan Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Rukka Sombolinggi

Tantangan lain adalah bagaimana merawat dan memperkuat peradaban asli nusantara. Setiap suku yang ada di Nusantara, yang jumlahnya lebih dari seribu, sudah mempunyai sistem adat masing-masing yang mengatur proses keberlangsungan hidup di antara mereka. Mereka sudah mampu mengatur komunitas suku mereka dengan sistem hukum dan pemerintahan yang mereka jalani. Sistem peradaban Nusantara harus dijaga secara terus-menerus sampai kapan pun.

Di bidang pertahanan<sup>7</sup>, kita dihadapkan dengan munculnya ancaman berupa rongrongan dari kekuasaan asing yang ingin turut serta menguasai sumber daya alam yang kita miliki. Selain eksternal, tantangan lain yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah tantangan internal berupa demografi dengan kebinekaan multidimensional. Selain kekayaan kebinekaan, keberagaman kebudayaan juga menyimpan potensi-potensi konflik. Kalau tidak hati-hati dalam mengelola kebinekaan yang amat besar ini, kita bisa berujung pada perpecahan yang berkeping-keping.

## Penutup<sup>8</sup>

Kebangkitan merupakan usaha kesengajaan. Gerak maju dari suatu peradaban selalu berawal dari usaha kesengajaan. Sumpah Pemuda dibangun atas kesengajaan. Kemerdekaan Indonesia dicapai atas dasar usaha sadar secara sengaja. Tidak ada gerak maju peradaban tanpa kesengajaan.

Kebangkitan kebangsaan bisa dimulai, pertama-tama, dengan keyakinan. Itulah mengapa Pancasila dimulai dari keyakinan, melalui ketuhanan. We are what we believe. Keyakinan membangkitkan the law of attraction. Kalau kita yakin, punya prasangka baik terhadap yang transenden, maka pintu-pintu berkah akan terbuka. Kemerdekaan dimulai dari keyakinan. Para pendiri bangsa, sebagai cerminan dari pemahaman tentang ketuhanan bahwa sesuatu selalu ada yang tidak bisa hanya dibatasi dengan perhitungan di atas kertas, bahwa tuhan adalah sesuatu yang memungkinkan hal yang impossible. Dengan keyakinan yang penuh itu Indonesia bisa merdeka.

Keyakinan tanpa vision ibarat suatu kebutaan. Para pendiri bangsa juga, dibalik keyakinan dan kepercayaan diri itu melengkapi dengan visi tentang bagaimana merdeka dan pasca merdeka. Visi itu kemudian dirumuskan dalam filosofi negara dan konstitusi negara.

---

<sup>7</sup> Disarikan dari pesan kebangsaan Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri.

<sup>8</sup> Disarikan dari Epilog Kongres Kebangsaan yang disampaikan oleh tokoh kebangsaan, Yudi Latif, Ph.D.

Menjalankan pemerintahan demokrasi merupakan jaring-jaring koordinasi, yang mempertemukan kekuatan nasional kita di dalam Pancasila. Demokrasi pemerintahan ada di sila keempat. Sila keempat diapit oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan kelima; ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan, dan sebelah kanan adalah keadilan sosial. Demokrasi merupakan enabler yang memungkinkan untuk bergerak ke depan menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan Makmur.

Namun, menjalankan pemerintahan memerlukan prasyarat rohaniah, mental dan kultural. Dimulai dari prasangka positif, dengan iman yang memancarkan energi positif bahwa energi buruk tidak akan membawa kebaikan. Hanya dengan positive emotion jalannya seluruh kekuatan nasional dapat digerakan bersama untuk tujuan yang lebih baik.

Sebagai pancaran dari iman itu kemudian masuk kita ke sila kedua. Sila kedua kuncinya dua, kalau kita ingin mengembangkan kemanusiaan. Pertama, mutual care (saling peduli terhadap sesama, tetangga, yang berbeda). Kalau Aceh mengalami tsunami, orang di Timur tidak bertanya Aceh itu agamanya apa atau etnisnya apa. Dengan care, mereka menyumbang. Kedua, liberty (kebebasan). Ada dua jenis kebebasan yang harus dikembangkan, yaitu negative liberty (merdeka dari: misalnya penindasan, penjajahan, diskriminasi, ketakutan, dan lain-lain. Kedua, positive liberty (bebas untuk: misalnya untuk mengembangkan diri, mengembangkan kehidupan, kebangsaan yang lebih baik, mencapai pencapaian luhur dari potensi kemanusiaan-kemanusiaan itu).

Dengan care dan liberty, bangsa Indonesia akan terkoneksi, inklusif dan saling terhubung, memiliki kesetaraan akses pada pendidikan, pengajaran, kesehatan, perbankan dan permodalan. Ada mutual trust di antara kita dengan konektivitas inklusif. Itulah sisi prasyarat mental kultural yang menjadi topangan bagi demokrasi.

Selain itu, demokrasi dijalankan untuk mewujudkan keadilan sosial. Demokrasi yang mengarah kepada kesenjangan sosial atau ketidakadilan sosial lebih besar, akan melahirkan tsunami sosial yang akan menikam demokrasi itu sendiri. Betul, kesenjangan diperlukan untuk men-drive achievement dan mendorong meritokrasi. Namun, bila kesenjangan dibiarkan terlalu lebar, karena desain politik yang tidak melahirkan situasi sosial-ekonomi ke arah lebih baik, akan terjadi polarisasi sosial yang tajam, prasangka, saling tidak percaya, dan mutual distrust yang berujung buruk buat semua.

Untuk menjalankan demokrasi yang mewujudkan keadilan dan kemakmuran selalu lebih baik memberikan peran proporsional, mana yang sebaiknya digarap oleh negara, komunitas atau dunia usaha. Dunia usaha bukan lawan dari negara,



tetapi dunia usaha adalah partner dalam usaha kemakmuran.

Komunitas adalah pemasok nilai, karena dari sanalah rahim nilai itu. Oleh karena itu, dalam urusan tata nilai kita kembalikan pada rahim untuk memulai. Ada banyak komunitas seperti komunitas agama, sekolah, media, adat, minat dan bakat, kerja, ormas dan lain-lain. Itulah gembala nilai Pancasila yang sesungguhnya, karena kalau nilai dikerjakan secara sukarela atau voluntary maka orang akan melihat Pancasila adalah suatu hal yang diperlukan in everyday life bukan hanya kepentingan negara. Sebaliknya kalau Pancasila terlalu indoktrinatif atau top down, warga negara akan melihat itu sebagai sesuatu yang eksternal atau dipaksakan kepada dirinya. Sehingga, Pancasila tidak menjadi bagian pembatinan yang organis di dalam diri. MPR, DPR dan birokrasi fokus pada perbaikan tata negara. Kalau MPR dan BPIP, mengembangkan sosialisasi Pancasila lebih baik harus bekerja sama dengan komunitas. Tugas negara adalah untuk memperbaiki tata kelola negara seperti tata kelola pemilu, otonomi, riset dan lain-lain.

Dalam kerangka itu, harus ada kontinuitas di dalam pembangunan. Pembangunan Borobudur memberi pelajaran. Borobudur yang dibangun pada abad ke-8, dibangun dalam waktu 75 sampai 100 tahun. Tanpa perencanaan jangka panjang yang berkelanjutan melampaui tiga rezim, Indonesia tidak akan melihat Borobudur sebagai peradaban luhur. Oleh karena itu, tata kelola mesti menjadi fokus perhatian daripada para penyelenggara negara.

Sedangkan tanggung jawab dalam usaha kemakmuran perlu diberikan kepada dunia usaha. Tidak ada negara makmur kalau dunia usahanya tidak berkembang maju. Agen utama dalam kemakmuran adalah dunia usaha, baik BUMN, swasta, maupun koperasi. Sifat relasi dalam dunia usaha harus partnership, gotong royong dan tolong menolong. Oleh karena itu, itulah cara bekerjanya gotong royong, masing-masing elemen punya peran fungsinya masing-masing tetapi secara keseluruhan disatukan oleh visi bersama membentuk negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

# PUBLIKASI MEDIA KONGRES KEBANGSAAN

## Hadiri Kongres Kebangsaan, Presiden Tegaskan Pentingnya Penguatan Kebangsaan

Oleh: Tempo.co , Kamis, 28 Oktober 2021 20:17 WIB

INFO NASIONAL – Presiden Joko Widodo bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober dengan turut serta dalam Kongres Kebangsaan yang mengusung tema besar “Ikhtiar Memperadabkan Bangsa” di Gedung Nusantara IV MPR, Kamis, 28 Oktober 2021.

“Saya berharap Kongres Kebangsaan dapat melakukan refleksi mendalam tentang dunia masa kini dan yang akan datang. Serta menghasilkan rekomendasi besar bagi penguatan kebangsaan. Lebih penting lagi, bisa memberikan rekomendasi langkah-langkah perbaikan apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kehidupan kebangsaan kita kedepan,” ujar Jokowi.

Presiden menjelaskan Sumpah Pemuda mengingatkan betapa pentingnya kata Satu Tanah Air, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa, Indonesia, menjadi kata kunci terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Walaupun ada lebih dari 270 juta penduduk, seluruhnya tetap satu kesatuan. Ada individu dengan segala kebebasannya, tetapi juga ada kepentingan bersama dengan segala konsensus dan konsekuensinya.

Presiden melanjutkan bahwa menjadi bangsa yang bersatu kekuatannya, merupakan syarat utama memenangkan persaingan global. Karena lanskap ekonomi global saat ini penuh dengan disrupsi dan kompetisi. Setelah Revolusi 4.0, dalam dua tahun ini disrupsi dipertegas dengan kehadiran pandemi Covid-19 yang mengajarkan setiap orang sebagai makhluk sosial.

“Solusi keluar dari pandemi bukanlah solusi individual, melainkan solusi bersama. Pandemi juga mengajarkan moralitas dan etika tentang keseimbangan kebebasan

individu dan stabilitas sosial serta kepentingan bersama,” tutur Presiden.

Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo menerangkan Kongres Kebangsaan diselenggarakan untuk menggugah kesadaran kolektif tentang persoalan-persoalan mendasar dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Serta menggalang tanggung jawab intelektual untuk turut memberikan kontribusi pemikiran dalam usaha transformasi sosial.

“Pada akhirnya akan menawarkan peta jalan pembangunan sebagai masukan rekomendasi kebijakan bagi penyusunan sistem perencanaan pembangunan nasional, serta menjadi ruang konsensus bersama berbagai entitas dalam pergumulan Indonesia yang bhinneka, dalam upaya membangun peradaban Pancasila,” ujar Bamsoet.

Ia melanjutkan, pelaksanaan Kongres Kebangsaan sengaja dilakukan bersamaan dengan peringatan Sumpah Pemuda, karena momentum Sumpah Pemuda adalah ikrar kebangsaan yang mendobrak sekat-sekat primordialisme dan menuntut kesadaran kolektif, bahwa satu-satunya cara untuk bertahan dari pusaran peradaban dan dinamika zaman adalah dengan mentransformasikan setiap diri sebagai bagian dari satu ke-Indonesiaan.

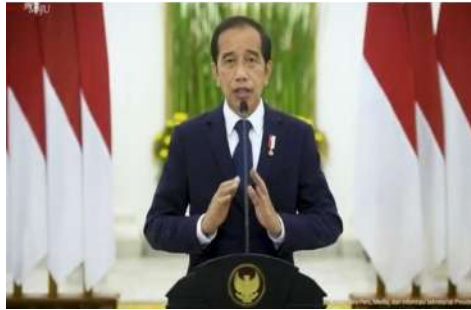
“Sebagaimana pandangan Bung Karno, bahwa frase dari Sabang sampai Merauke bukanlah rangkaian kata-kata yang sekedar mempresentasikan entitas geografi, melainkan satu entitas kebangsaan, satu entitas kenegaraan, satu kesatuan tekad, satu kesatuan ideologi, dan satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup dalam gelora semangat kebangsaan dalam membangun peradaban,” kata dia.

Kongres ini terselenggara hasil kerja sama MPR RI dengan Aliansi Kebangsaan dan Forum Rektor Indonesia, didukung Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dan Media KOMPAS.

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Syarif Hasan, Arsul Sani, dan Hidayat Nur Wahid. Hadir pula Ketua Kelompok DPD RI Tamsil Linrung, Ketua Umum Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo, Ketua Forum Rektor Indonesia Prof. Ir. Panut Mulyono, Ketua Umum AIPI Dr. Alfitra Salam, Pakar Aliansi Kebangsaan Yuddy Latief, Rektor Universitas Hasanuddin Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu, Rektor Universitas Terbuka Prof. Ojat Darajat, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Dr. Ma'mun Murod, Ketua PPAD Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnarki serta para pendiri dan tokoh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) antara lain Abdul Latief, Jan Darmadi, dan Maher Algadri. ■

# Ini Harapan Jokowi dari Digelarnya Kongres Kebangsaan MPR

Angga Laraspati - detikNews, Kamis, 28 Okt 2021 21:38 WIB



Jakarta – Presiden Joko Widodo bersama Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan turut serta dalam ‘Kongres Kebangsaan’. Jokowi berharap Kongres Kebangsaan dapat melakukan refleksi mendalam tentang dunia masa kini dan yang akan datang. “Serta menghasilkan rekomendasi besar bagi penguatan kebangsaan. Lebih penting lagi, bisa memberikan rekomendasi langkah-langkah perbaikan apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kehidupan kebangsaan kita kedepan,” ujar Jokowi, Kamis (28/10/2021).

Saat memberikan sambutan pembuka ‘Kongres Kebangsaan’, Jokowi mengatakan Sumpah Pemuda mengingatkan betapa pentingnya kata Satu; Satu Tanah Air, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa, Indonesia yang menjadi kata kunci terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara.

Bansoet Sebut Membangun Peradaban Bangsa Harus Berlandaskan Pancasila Walaupun ada lebih dari 270 juta penduduk, seluruhnya tetap satu kesatuan. Ada individu dengan segala kebebasannya, tetapi juga ada kepentingan bersama dengan segala konsensus dan konsekuensinya. Jokowi juga menjelaskan komitmen terhadap kebebasan individu dijamin konstitusi. Tetapi menjadi Indonesia Incorporated, menjadi bangsa yang bersatu kekuatannya, merupakan syarat utama memenangkan persaingan global. Karena landscape ekonomi global saat ini penuh dengan disrupsi dan kompetisi. “Setelah Revolusi 4.0, dalam dua tahun ini disrupsi dipertegas dengan kehadiran pandemi COVID-19, yang juga mengajarkan tentang posisi kita sebagai makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa selamat sendirian. Hanya bisa selamat kalau semua diselamatkan.

Solusi keluar dari pandemi bukanlah solusi individual, melainkan solusi bersama. Pandemi juga mengajarkan moralitas dan etika tentang keseimbangan kebebasan individu dan stabilitas sosial serta kepentingan bersama,” jelas Jokowi. ■

# Kongres Kebangsaan, Polri:

## Tujuan Paripurna Mewujudkan Bangsa Adil dan Makmur

Kamis, 28 Oktober 2021 | 18:09 WIB, Oleh : Bayu Marhaenjati / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Pancasila sebagai ideologi bangsa mengandung makna yang holistik dan mendalam dengan hakikat tujuan paripurna yakni, mewujudkan bangsa Indonesia adil dan makmur.

Begitu bunyi sepenggal teks pidato Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dibacakan Wakabaintelkam Polri Irjen Pol Suntana, dalam kegiatan Kongres Kebangsaan dengan tema “Ikhtiar Memperadabkan Bangsa”, yang disiarkan secara daring, Kamis (28/10/2021). Suntana mengatakan, kemerdekaan Indonesia didapat melalui perjuangan yang berat dan sangat panjang. Perjuangan tersebut tidak terlepas dari peran serta pemuda pemudi dan para pendiri bangsa.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dan Pancasila yang juga sebagai alat mempersatu bangsa, kata Suntana, telah membuktikan dan memberikan sebuah pemahaman tentang hakekat persatuan dan kesatuan. “Pancasila sebagai ideologi bangsa mengandung makna yang holistik dan mendalam. Ideologi kebangsaan Indonesia, Pancasila, pada hakikatnya tujuan hakiki dari bangsa Indonesia yang memiliki berbagai dimensi untuk mencapai tujuan yang paripurna. Tujuan paripurna yang kita ketahui, yang hendak dicapai yaitu, terwujudnya bangsa dan negara Republik Indonesia yang adil dan makmur,” ujar Suntana.

Dikatakan Suntana, hal itu harus disepakati bukan hanya sebagai slogan, moto atau simbolis, bukan pula suatu mimpi yang tidak bisa dicapai. “Tetapi tujuan ini memang seharusnya diperjuangkan oleh semua elemen bangsa,” untkannya. Suntana menyampaikan, Indonesia telah membuktikan berhasil melalui masa kritis di tengah pandemi Covid-19, berkat kerja keras seluruh masyarakat dan bangsa.

“Momentum ini harus kita jadikan modal dalam merajut kebersamaan dan sinergi semua pihak masyarakat untuk menghadapi berbagai cobaan bangsa,” katanya. Menurut Suntana, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu pilar kekuatan bangsa yang bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan kamtibmas. “Kami mengajak seluruh pemuda pemudi dan seluruh bangsa Indonesia untuk melawan radikalisme dan gerakan intoleransi demi mewujudkan Indonesia yang berbineka, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” ucapnya.

Suntana melanjutkan, sejarah telah mencatat, khususnya pada peristiwa 28 Oktober 1928, lahir sebuah perjuangan pemuda untuk bangsa ini, sebelum Indonesia merdeka. Pemuda pemudi kala itu menjadi lokomotif perjuangan yang berhasil meniupkan angin perubahan untuk meraih

kemerdekaan. Saat itu, pemuda pemudi nusantara bertekad mempersatukan tujuan dan cita-cita kebangsaan.

“Mereka datang mewakili etnis dan entitas tradisional dan kedaerahan, perbedaan dilupakan dan ikat oleh simpul persatuan sehingga akhirnya melahirkan sebuah konsensus bersama untuk membuat bangsa dan negara yang diberi nama Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda menjadi titik balik bagi persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan yang akhirnya terus dipupuk pemuda pemudi hingga mencapai puncak pada kemerdekaan yang kita raih pada tahun 1945,” jelasnya.

Kendati demikian, perjuangan pemuda pemudi belum berhenti sampai di situ. Kemerdekaan adalah awal mula bagi pemuda pemudi untuk terus memperlihatkan peranannya agar bisa mengisi kemerdekaan dengan baik serta membuat Indonesia menjadi bangsa negara yang unggul dibandingkan negara-negara yang lain. “Memang tidak mudah untuk mewujudkan itu semua, banyak rintangan dan tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam tubuh pemuda dan pemudi itu sendiri. Apalagi kita tahu ditambah arus globalisasi yang masif, yang tak bisa dibendung. Harus diingat, tantangan anak muda di masa lalu berbeda dengan tantangan anak muda pada saat masa sekarang,” katanya.

Seperti yang kita ketahui, tambahnya, Indonesia saat ini sedang menghadapi bonus demografi. Satu sisi bonus demografi memberikan keuntungan, karena jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dan sebagai target pasar bagi hasil produksi. Tetapi di sisi lain, bonus demografi bisa menjadi bencana jika pemuda yang jumlahnya sangat banyak ini belum dibekali kemampuan yang bisa memberikan kontribusi untuk pembangunan bangsa dan negara. “Untuk menjadikan pemuda tidak menjadi bencana demografi, saya mengimbau pemuda pemudi Indonesia menjadi pemuda pemudi emas, yaitu pemuda pemudi yang energik, masif dan akademis. Polri sangat berharap pada tahun 2045, Indonesia menjadi negara maju. Pemuda emas, Indonesia maju dan Indonesia makmur,” katanya ■

# Ketua MPR: Kongres Kebangsaan Ikhtiar Adabkan Bangsa

Oleh: Tempo.co, Jumat, 29 Oktober 2021 19:56 WIB

INFO NASIONAL- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsuet menekankan perlu ada pemikiran dan kekuatan alternatif untuk mengingatkan dan menunjukan peta jalan pembangunan yang lebih dapat diandalkan.

“Jalan pembangunan yang lebih menjamin ketahanan nasional dengan kesanggupan untuk merealisasikan visi dan misi negara berdasarkan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ujar Bamsuet dalam ‘Kongres Kebangsaan: Ikhtiar Memperadabkan Bangsa’, di Gedung Nusantara IV MPR RI, Jakarta, Kamis 28 Oktober.

Visi negara sebagaimana tertuang pada alinea kedua pembukaan Konstitusi adalah terwujudnya perikehidupan kebangsaan ‘yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur’. Adapun misi negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat adalah ‘melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

“Cita-cita mewujudkan visi-misi negara yang bersifat prinsipil tersebut, harus diterjemahkan dalam rujukan haluan negara, yang idealnya menjadi wewenang seluruh rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara, dan direpresentasikan melalui lembaga perwakilan. Dalam konsepsi ini, MPR adalah lembaga perwakilan terlengkap, yang mewakili representasi rakyat (DPR) dan representasi teritorial (DPD). Inilah yang melatar belakangi MPR periode 2009-2014 dan MPR periode 2014-2019 merekomendasikan dibentuknya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN),” ujar Bamsuet.

Kongres Kebangsaan: Ikhtiar Memperadabkan Bangsa’, diselenggarakan oleh MPR RI bekerjasama dengan Aliansi Kebangsaan dan Forum Rektor Indonesia. Didukung Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), serta Media KOMPAS. Kegiatan juga di hadiri pimpinan MPR, akademisi dan tokoh masyarakat.

Ketua DPR RI ke-20 dan Mantan Ketua Komisi III Bidang Hukum & Keamanan DPR

RI ini menegaskan, dalam pembahasan PPHN, kurang bijaksana jika hanya mendasarkan pada sikap politik setuju atau tidak setuju, yang kemudian dicari berbagai alasan afirmatif untuk mendukung sikap tersebut.

“Kiranya layak diperhatikan bahwa negara Indonesia dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara bukan hanya dilakukan secara fragmentaris, melainkan secara terencana dengan matang dan terintegrasi antar berbagai wilayah di Indonesia,” kata Bamsuet.

Menurutnya, PPHN dalam konteks saat ini tidak hanya penting, namun mendesak dan harus dilakukan untuk mewujudkan pembangunan nasional yang selaras dan konsisten dengan paradigma Pancasila, serta berkesinambungan dan berkelanjutan secara lintas periode pemerintahan.

“PPHN mengarahkan pengelolaan pembangunan nasional, mewujudkan cita-cita nasional, yaitu membangun negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945,” pungkas Bamsuet. (\*)■



# Peradaban Indonesia Telah Mengakar pada Sosial Budaya Nusantara Sejak Lama

Kamis, 28 Oktober 2021 | 17:10 WIB, Oleh : Bayu Marhaenjadi / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Sumpah Pemuda merupakan tonggak sejarah dalam proses tumbuh kembangnya bangsa Indonesia. Kendati sebagai kesatuan identitas Indonesia baru lahir pada waktu itu, namun peradaban Indonesia sudah berakar pada elemen-elemen sosial budaya di Nusantara, puluhan ribu tahun silam.

Hal itu disampaikan Ketua Panitia Acara Kongres Kebangsaan Mayjen TNI (Purn) I Dewa Putu Rai, dalam pidato sambutannya di Kongres Kebangsaan dengan tema “Ikhtiar Memperadabkan Bangsa”, yang disiarkan secara daring, Kamis (28/10/2021).

“Kongres kebangsaan ini sengaja dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda yang merupakan tonggak sejarah penting dalam proses tumbuhnya kebangsaan Indonesia. Walaupun bangsa Indonesia sebagai kesatuan identitas baru lahir pada momen bersejarah Sumpah Pemuda ini, namun peradaban Indonesia sesungguhnya sudah berakar pada elemen-elemen sosial budaya yang telah puluhan ribu lamanya hadir di Bumi Nusantara,” ujar Dewa.

Dikatakan Dewa, penulis Clifford Geertz dalam bukunya yang berjudul “Old Societies dan New States”, mengilustrasikan Indonesia sebagai old wine in new bottle atau anggur tua dalam botol baru. “Gugusan masyarakat lama dalam negara baru. Bahkan, di masa lalu, bangsa ini diakui pernah memiliki peradaban tinggi dengan penguasaan teknologi yang tinggi pula pada zamannya. Tanpa penguasaan teknologi yang tinggi rasanya mustahil anak-anak bangsa pada zaman Kerajaan Sailendra mampu membangun Candi Borobudur yang memiliki 2.672 panel relief dan 504 arca Budha,” ungkapnya.

Akan tetapi, kata Dewa, harus diakui peradaban bangsa Indonesia pernah juga mengalami keterpurukan akibat penjajahan ratusan tahun lebih, sehingga mengalami apa yang disebut hegemoni peradaban kolonialisme. Dewa menuturkan dalam rangka menggalang pemikiran dan gagasan untuk membangun kembali peradaban Indonesia, maka sejak 20 Maret 2019, Aliansi Kebangsaan bersama Forum Rektor Indonesia, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Yayasan Suluh Nusantara Bakti, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, serta media telah menyelenggarakan diskusi serial selama kurang lebih tiga tahun, dengan tema “Kebangsaan yang Berperadaban Membangun Indonesia dengan Paradigma Pancasila”. “Diskusi serial ini dilaksanakan atas keterpanggilan dan kesadaran para cendekiawan Indonesia akan perlunya terobosan dan pendekatan baru dalam menjawab tantangan pembangunan bangsa atau pembangunan negara, untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” katanya.

Melalui pertukaran pikiran dan gagasan selama pelaksanaan diskusi serial tersebut, tambahnya, telah dikembangkan suatu pendekatan budaya peradaban berdasarkan paradigma Pancasila sebagai perangkat operasional pembangunan nasional dalam tiga ranah kehidupan bangsa yaitu, ranah mental kultural atau tata nilai, ranah institutional political atau ranah tata kelola, dan ranah tata sejahtera.

“Pendekatan tiga ranah peradaban dengan paradigma Pancasila ini diyakini dapat digunakan sebagai tolok ukur paradigmatis dalam menguji dan mengembangkan sistem ketahanan nasional dan pembangunan nasional kita. Berbagai argumentasi serta pemikiran selama pelaksanaan diskusi serial tersebut telah dirangkum di dalam sebuah buku yang saat ini masih dalam proses pencetakan,” ucapnya. Dewa menegaskan upaya menyosialisasikan dan memperkaya berbagai pemikiran dalam pendekatan paradigma tersebut terus dilaksanakan. Puncaknya diharapkan melalui kongres kebangsaan hari ini.

“Gagasan pelaksanaan kongres hari ini mendapatkan dukungan cukup luas dari kaum cendekiawan berbagai lintas profesi dan institusi, golongan pengusaha dan masyarakat politik, serta berbagai komponen masyarakat yang merasa terpenggil menjadikan krisis pandemi Covid-19 yang sedang kita hadapi sebagai titik balik kebangkitan bangsa, sebagaimana komitmen dan janji kebangsaan yang diikrarkan oleh pemuda pemudi Indonesia, pada kongres pemuda kedua, pada 28 Oktober 1928 yang lalu,” katanya. Menurut Dewa, komitmen dan janji kebangsaan yang menyatukan semua perbedaan dalam satu identitas Bangsa, Tanah Air dan Bahasa Indonesia tersebut, tentu merupakan modal sosial yang sangat berharga bagi Bangsa Indonesia yang harus dirawat dan dikuatkan kembali untuk kemajuan bangsa dan negara ke depan.

“Saat ini kita sedang menghadapi pandemi Covid-19 dengan dampaknya yang begitu luas. Untuk itu, kiranya kongres kebangsaan ini dapat dijadikan ruang dan momentum penguatan komitmen kebangsaan kita dalam ikhtiar memperadabkan bangsa sebagaimana tema kongres kebangsaan hari ini,” tandasnya ■

# Dua Pekerjaan Rumah

## Wujudkan Persatuan dan Keadilan Sosial

Jumat, 29 Oktober 2021 | 13:51 WIB, Oleh : Bayu Marhaenjati / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Terdapat dua pekerjaan rumah dan mutlak untuk mewujudkan persatuan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat yakni, upaya integrasi internal dan adaptasi eksternal. Hal itu disampaikan, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Kiki Syahnakri dalam Kongres Kebangsaan bertajuk "Ikhtiar Memperadabkan Bangsa" secara daring, Kamis (28/10/2021).

"Melihat karakteristik keindonesiaan dan sejarah kebangsaan, maka dalam mengisi kemerdekaan terdapat dua pekerjaan rumah akbar sekaligus mutlak bagi bangsa Indonesia yaitu, upaya integrasi internal untuk mewujudkan persatuan Indonesia dan upaya adaptasi eksternal untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Kiki dalam keterangannya, Jumat (29/10/2021).

Kiki menyampaikan ditinjau dari aspek demografi, Tanah Air Indonesia memiliki tiga ciri utama, yaitu sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, terletak pada posisi silang yang strategis dan kaya akan sumber daya alam. "Mengelola negara kepulauan tentu jauh lebih sulit dari pada mengelola negara kontinental, terutama dalam hal menyatukan dan memakmurkan bangsa. Konsekuensi dari ciri letak strategis dan kaya sumber daya alam adalah beredarnya kepentingan asing yang dapat melahirkan konflik serta ancaman," ungkapnya.

Kiki melanjutkan secara demografis bangsa Indonesia selain memiliki jumlah penduduk besar -nomor empat terbesar di dunia-, juga memiliki kebinekaan luas multidimensi. Dalam ciri demografis ini, tersimpan aneka kekayaan budaya bangsa sekaligus juga terkandung berbagai potensi konflik. "Keliru mengelola kebinekaan, niscaya akan muncul konflik nyata. Sejarah kebangsaan kita sejak sebelum proklamasi kemerdekaan kental diwarnai dengan persaingan bahkan pertarungan ideologi antara-kelompok nasionalis, Islam, liberalis, komunis," katanya.

Menurut Kiki, untuk itulah para founding fathers telah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup sekaligus perekat bangsa, serta merancang UUD 1945 sebagai undang-undang yang dijiwai Pancasila.

"Sayangnya, dalam reformasi 1998 yang diikuti dengan amendemen undang-undang dasar telah terjadi penggantian Undang-Undang Dasar 1945 menjadi 'undang-undang dasar 2002' yang secara fundamental telah mengubah roh persatuan, kebersamaan, kekeluargaan sebagai hakikat dari Pancasila menjadi kebebasan sesuai dengan hakekat liberalisme individualisme,"

ujar Kiki.

Dihadapkan pada kebinekaan masyarakat yang luas multidimensi dan tingkat kedewasaan berdemokrasi yang belum baik, maka kebebasan tadi menjelma menjadi kebebasan yang nyaris tanpa batas. Kebebasan luas yang berkembang mendadak dalam masyarakat ini, secara derivatif telah melahirkan libido kekuasaan tinggi yang kemudian diikuti dengan merebaknya politik uang, korupsi, politik dinasti, politik korporasi dan oligarki.

“Itu semua merupakan kanker ganas dalam berdemokrasi. Disadari atau tidak, kebebasan nyaris tanpa batas yang tadi disampaikan justru telah menjauhkan bangsa Indonesia dari upaya mewujudkan integrasi internal dan adaptasi eksternal. Sebaliknya telah memunculkan berbagai macam konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berpotensi membawa bangsa Indonesia terjebak dalam perpecahan. Sebelum itu terjadi, saya mendesak para elite politik untuk melakukan kaji ulang undang-undang dasar hasil amendemen tadi atau ‘undang-undang dasar 2002,’ kata Kiki. ■

# Jokowi: Komitmen Kebebasan Individu Dijamin Konstitusi, Tapi Ada Kepentingan Bersama

Kamis, 28 Oktober 2021 12:02, Reporter : Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan kebebasan individu dijamin oleh konstitusi. Namun, ada juga kepentingan bersama menjadi bangsa yang bersatu. Hal itu ia sampaikan dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda.

"Ada individu dengan segala kebebasannya tetapi ada kepentingan bersama dengan segala konsensus dan konsekuensinya," ujar Jokowi dalam acara Kongres Kebangsaan yang digelar MPR RI, Kamis (28/10).

"Komitmen terhadap kebebasan individu dijamin konstitusi tetapi menjadi Indonesia incorporated, menjadi bangsa yang bersatu kekuatannya, merupakan syarat utama memenangkan persaingan global," tegasnya. Lebih lanjut, Jokowi bilang, lanskap ideologi politik dan ekonomi global penuh dengan disrupsi dan kompetisi setelah revolusi industri 4.0. Hal ini pun dipertegas dengan adanya pandemi Covid-19. "Dalam dua tahun ini disrupsi dipertegas dengan pandemi covid-19. Pandemi covid mengajarkan kita tentang posisi sentral kita sebagai makhluk sosial," kata Jokowi.

Pandemi mengajarkan bahwa manusia tidak bisa selamat sendirian. Hanya selamat kalau semua orang diselamatkan. "Pandemi mengajarkan kita tidak ada yang bebas dari resiko covid sampai semua orang terbebas dari covid. Solusi pandemi Covid-19 merupakan solusi bersama, bukan individual," ujar Jokowi. Jokowi menuturkan, pandemi mengajarkan untuk saling membantu dan saling mendisiplinkan. Seperti harus menggunakan masker dan isolasi bagi yang terpapar agar tidak menularkan.

Belajar dari pandemi, Jokowi bilang perlu moralitas dan etika keseimbangan antara kebebasan individu dengan stabilitas sosial dan kepentingan bersama. Juga keseimbangan demokrasi dengan pemerintahan dan pelayanan efektif, serta tentang keseimbangan pengawasan dan audit dengan fleksibilitas dan kecepatan. Selain itu, Jokowi mengatakan, pandemi mengajarkan untuk merujuk pada kaidah ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi terbaru. "Kecepatan untuk menyediakan vaksin dan obat-obatan menunjukkan betapa pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pentingnya kemandirian ekonomi dan produksi yang dilandasi dengan institusi pendidikan dan penelitian yang kuat dan SDM yang unggul," ujar Jokowi ■

# KONGRES KEBANGSAAN

## “Ikhtiar Memperadabkan Bangsa”

Jakarta, 28 Oktober 2021

Kongres Kebangsaan dilaksanakan bersamaan dengan hari peringatan Sumpah Pemuda. Momentum ini dipilih secara sengaja sebab Sumpah Pemuda merupakan tonggak sejarah dalam proses tumbuhkembangnya bangsa Indonesia. Kendati sebagai kesatuan identitas Indonesia baru lahir pada waktu itu, namun peradaban Indonesia sudah berakar pada elemen-elemen sosial budaya di Nusantara, puluhan ribu tahun silam. Sebagaimana dikutip oleh Ketua *Steering Committee*, Mayjen TNI (Purn) I Dewa Putu Rai, dari Clifford Geertz dalam buku berjudul “*Old Societies dan New States*”, Indonesia adalah *old wine in new bottle* atau anggur tua dalam botol baru. Gugusan masyarakat lama dalam negara baru. Di masa lalu, bangsa ini diakui pernah memiliki peradaban tinggi dengan penguasaan teknologi yang tinggi pula pada zamannya. Tanpa penguasaan teknologi yang tinggi rasanya mustahil anak-anak bangsa pada zaman Kerajaan Syailendra mampu membangun Candi Borobudur yang memiliki 2.672 panel relief dan 504 arca Buddha.

Harus diakui peradaban bangsa Indonesia pernah juga mengalami keterpurukan akibat penjajahan ratusan tahun lebih, sehingga mengalami apa yang disebut hegemoni peradaban kolonialisme. Hingga kini, negara-bangsa Indonesia masih dalam proses untuk bangkit membangun kembali peradaban Pancasila. Dalam konteks itu, untuk menggalang pemikiran dan gagasan untuk membangun kembali peradaban Indonesia, maka sejak 20 Maret 2019, Aliansi Kebangsaan bersama Forum Rektor Indonesia, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Yayasan Suluh Nusantara Bakti, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, serta media telah menyelenggarakan diskusi serial selama kurang lebih tiga tahun, dengan tema “Kebangsaan yang Berperadaban Membangun Indonesia dengan Paradigma Pancasila”. Diskusi serial tersebut dilaksanakan atas keterpanggilan dan kesadaran para cendekiawan Indonesia akan perlunya terobosan dan pendekatan baru dalam menjawab tantangan pembangunan bangsa atau pembangunan negara, untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan Makmur ●